INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA BONTANG

2023

VOLUME 18, 2023



Katalog: 4102004.6474 ISSN 2656-9272

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA BONTANG

2023

VOLUME 18, 2023



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT **KOTA BONTANG 2023**

Volume 18, 2023

Katalog: 4101002.6474

ISSN: 2656-9272

Nomor Publikasi: 64740.2319

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xiv + 112 halaman pontandkota.bps.do.id

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Pencetak:

CV Suvi Sejahtera

Sumber Ilustrasi:

freepik.com, canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang 2023 Volume 18, 2023

Pengarah:

Widiyantono, S.S.T., M.Stat.

Penanggung Jawab:

Widiyantono, S.S.T., M.Stat.

Penyunting:

Intan Kusuma Negara, S.E., M.M. Della Nabiela, S. Tr. Stat.

Pengolah Data:

Nabila Widiastuti, S.Tr.Stat. Rivaldo Mubarak, S.Tr.Stat.

Penulis Naskah:

Nabila Widiastuti, S.Tr.Stat. Rivaldo Mubarak, S.Tr.Stat.

Penata Letak:

Della Nabiela, S. Tr. Stat.

Pembuat Infografis:

Rivaldo Mubarak, S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

Publikasi "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang 2023" ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bontang dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan tingkat kesejahteraan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat Kota Bontang dari waktu ke waktu.

Data yang disajikan dalam publikasi ini sebagian besar diperoleh dari hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2023, serta dilengkapi dengan data pendukung dari berbagai sumber terkait. Data dalam publikasi ini mencakup data lengkap tahun berjalan.

Kami menyadari masih banyak indikator-indikator kesejahteraan rakyat yang belum disajikan di dalam publikasi ini. Harapan kami, dengan terbitnya buku ini, kebutuhan data mengenai indikator kesejahteraan rakyat sebagian besar sudah dapat dipenuhi. Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam terwujudnya publikasi ini.

Bontang, Desember 2023 Kepala BPS Kota Bontang

Widiyantono, S.S.T., M.Stat.

DAFTAR ISI

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang 2023 Volume 18, 2023

KATA PENGAN	ITAR	V
DAFTAR ISI		vii
DAFTAR TABE	L	ix
DAFTAR GAMI	BAR	хi
DAFTAR LAMP	PIRAN	ĸiii
BAB I. PENDAI	HULUAN	. 1
1.1.	Latar Belakang	. 3
1.2.	Sistematika Penulisan	. 5
1.3.	Sumber Data	
BAB II. KONSE	P DAN DEFINISI	. 7
2.1.	Kependudukan	. 9
2.2.	Pendidikan	11
2.3.	Kesehatan	13
2.4.	Ketenagakerjaan	13
2.5.	Perumahan	15
2.6.	Pengeluaran Rumah Tangga	15
BAB III. KEPEN	IDUDUKAN	17
3.1.	Profil Persebaran dan Pertumbuhan Penduduk	21
3.2.	Fertilitas dan Keluarga Berencana	28
BAB IV. KESEH	ATAN	37
4.1.	Perkembangan Angka Harapan Hidup, Angka Kesakitan,	
	dan Rata-Rata Lama Sakit	41
4.2.	Fasilitas Kesehatan	47
4.3.	Kesehatan Balita	49

BAB V. PENDIDIKAN		53	
5.1.	Melek Huruf dan Tingkat Pendidikan	56	
5.2.	Tingkat Partisipasi Sekolah	60	
5.3.	Fasilitas Pendidikan	62	
BAB VI. KETEN	AGAKERJAAN	65	
6.1.	Keadaan Angkatan Kerja	68	
6.2.	Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	70	
BAB VII. PERU	BAB VII. PERUMAHAN		
7.1.	Kondisi Perumahan	77	
	Fasilitas Rumah		
BAB VIII. POLA KONSUMSI		87	
8.1.	Pengeluaran Rumah Tangga	89	
8.2.	Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga	91	
LAMPIRAN		95	

DAFTAR TABEL

	Halam	ian
Tabel 3.1	Indikator Demografi Kota Bontang, 2020-2023	24
Tabel 3.1	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan di Kota Bontang, 2022-2023	29
Tabel 3.2	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Umur Pertama Perkawinan di Kota Bontang, 2022-2023	31
Tabel 4.1	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kota Bontang, 2022-2023	45
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Menurut Alasan Tidak Berobat Jalan di Kota Bontang, 2022-2023	46
Tabel 4.3	Rasio Sarana Kesehatan Terhadap 10.000 Penduduk Kota Bontang, 2019-2023	47
Tabel 4.4	Persentase Penolong Pertama Persalinan Menurut Penolong Kelahiran di Kota Bontang, 2020-2023	50
Tabel 5.1	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Ijazah/STTB yang dimiliki) di Kota Bontang, 2015-2023	57
Tabel 5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bontang, 2022-2023	61
Tabel 5.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Kota Bontang, 2022-2023	61
Tabel 5.3	Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bontang, 2021/2022-2022/2023	63
Tabel 5.4	Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bontang, 2019/2020 - 2022/2023	64
Tabel 6.1	Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Menurut Kegiatan Utama dan Indikator Ketenagakerjaan di Kota Bontang, 2022-2023	69

Tabel 7.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kota Bontang, 2020-2023	78
Tabel 7.2	Kondisi Perumahan di Kota Bontang, 2020-2023	79
Tabel 7.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan/Bangunan di Kota Bontang, 2020-2023	81
Tabel 7.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kota Bontang, 2022-2023	82
Tabel 7.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang Digunakan di Kota Bontang, 2022-2023	83
Tabel 7.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Bontang, 2020-2023	84
Tabel 7.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang Digunakan di Kota Bontang, 2020-2023	85
Tabel 8.1	Rata-Rata dan Persentase Pengeluaran Makanan Per Kapita Kota Bontang, 2022-2023	93
Tabel 8.2	Rata-Rata dan Persentase Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Kota Bontang, 2022-2023	94

DAFTAR GAMBAR

	Halan	nan
Gambar 3.1	Persentase Persebaran Penduduk Kota Bontang, 2022	21
Gambar 3.2	Persentase Persebaran Penduduk Kota Bontang 2023	22
Gambar 3.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bontang, 2018-2023	23
Gambar 3.4	Piramida Penduduk Kota Bontang, 2022	26
Gambar 3.5	Piramida Penduduk Kota Bontang, 2023	27
Gambar 3.6	Persentase Wanita Usia Subur Pernah Kawin Menurut Pemakaian KB di Kota Bontang, 2022-2023	33
Gambar 3.7	Persentase Wanita Pernah Kawin Menurut Jenis KB di Kota Bontang, 2023	34
Gambar 4.1	Analisis Derajat Kesehatan Hendrik L. Blum	39
Gambar 4.2	Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kota Bontang, 2015-2023	41
Gambar 4.3	Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2022	42
Gambar 4.4	Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2023	43
Gambar 4.5	Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit Kota Bontang, 2023	44
Gambar 4.6	Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Bontang, 2022-2023	51
Gambar 5.1	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bontang, 2015-2023	59
Gambar 6.1	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kota Bontang, 2022-2023	71

Gambar 6.2	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Pekerjaan Utama Kota Bontang, 2023	72
Gambar 6.3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Berdasarkan Jenis Kegiatan dan Tingkat Pendidikan di Kota Bontang, 2023	73
Gambar 8.1	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Bontang, 2023	90
Gambar 8.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran Sebulan di Kota Bontang, 2023	91
Gambar 8.3	Persentase Pengeluaran Rumah Tangga Menurut Jenisnya Kota Bontang, 2023	92

DAFTAR LAMPIRAN

	Halai	man
Lampiran 1.	Relative Standard Error (RSE) Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kota Bontang, 2023	. 97
Lampiran 2.	Relative Standard Error (RSE) Persentase Penolong Pertama Persalinan Menurut Penolong Kelahiran di Kota Bontang, 2023	. 98
Lampiran 3.	Relative Standard Error(RSE) Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Ijazah/STTB yang dimiliki) di Kota Bontang, 2023	. 99
Lampiran 4.	Relative Standard Error(RSE) Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk menurut Karakteristik di Kota Bontang, 2023	100
Lampiran 5.	Relative Standard Error(RSE) Rata-Rata Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) di Kota Bontang, 2023	101
Lampiran 6.	Relative Standard Error(RSE) Rata-Rata Pengeluaran Bukan Makanan per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) di Kota Bontang, 2023	102
Lampiran 7.	Relative Standard Error(RSE) Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Menurut Kegiatan Utama dan Indikator Ketenagakerjaan di Kota Bontang, 2023	103
Lampiran 8.	Relative Standard Error(RSE) Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kota Bontang, 2023	104
Lampiran 9.	Relative Standard Error(RSE) Kondisi Perumahan di Kota Bontang, 2023	105
Lampiran 10.	Relative Standard Error(RSE) Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan/Bangunan di Kota Bontang, 2023	106

Lampiran 11.	Relative Standard Error(RSE) Persentase Rumah Tangga Menurut	
	Sumber Penerangan di Kota Bontang, 2023	107
Lampiran 12.	Relative Standard Error (RSE) Persentase Rumah Tangga Menurut	
	Sumber Air Minum yang Digunakan di Kota Bontang, 2023	108
Lampiran 13.	Relative Standard Error(RSE) Persentase Rumah Tangga Menurut	
	Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Bontang,	
	2023	109
Lampiran 14.	Relative Standard Error(RSE) Persentase Rumah Tangga Menurut	
	Jenis Kloset yang Digunakan di Kota Bontang, 2023	110
Lampiran 15.	Relative Standard Error (RSE) Persentase Penduduk Menurut	
	Kelompok Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Bontang, 2023	111
Lampiran 16.	Relative Standard Error (RSE) Persentase Rumah Tangga Menurut	
	Kelompok Pengeluaran Sebulan di Kota Bontang, 2023	112
	Kelompok Pengeluaran Sebulah di Kota Bontang, 2023	
	lu _x .	



BAB I PENDAHULUAN



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu cita-cita Bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tercantum di dalamnya perihal tanggung jawab negara untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa negara berkewajiban untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, dengan menyelenggaralan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Selain itu, definisi tentang kesejahteraan sosial juga tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Presiden Jokowi memiliki agenda prioritas pembangunan yang disebut Nawacita. Terdapat 9 poin nawacita yang diagendakan, salah satunya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2020.

Pemerintahan Kota Bontang memiliki visi yaitu "Terwujudnya Kota Bontang Yang Lebih Hebat Dan Beradab". Visi ini dijabarkan dalam beberapa misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 yaitu Kota Bontang Harmoni melalui pemantapan dan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan; Kota Bontang yang Berkelanjutan, layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup; Kota Bontang yang Berdaya Saing dan Sejahtera melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk mendukung berjalannya proses pembangunan tersebut, ketersediaan berbagai informasi sangat dibutuhkan. Peranan penting informasi di dalam pembangunan bukan hanya sebagai bahan evaluasi pencapaian pembangunan, namun juga sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam merumuskan berbagai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Informasi tersebut dapat berupa informasi kualitatif maupun kuantitatif yang disajikan dalam bentuk bermacam-macam indikator.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang 2023 hadir sebagai bagian dari penyediaan informasi, terutama mengenai keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Bontang. Data yang disajikan di dalam publikasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran umum mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kota Bontang, sehingga memberikan manfaat bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas dalam menjalankan perannya masing-masing di dalam proses pembangunan Kota Bontang khususnya, dan Indonesia umumnya.

Data dalam publikasi ini dihasilkan dari kegiatan statistik yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dengan metodologi yang dirancang sedemikian rupa sehingga kehadiran kendala-kendala di dalam metodologi dapat diterima secara umum. Perkembangan sosial antar waktu di dalam publikasi ini merupakan kondisi makro. Oleh sebab itu data tersebut perlu disandingkan dengan berbagai data lain yang sifatnya mikro sehingga diperoleh gambaran kondisi kesejahteraan rakyat Kota Bontang yang menyeluruh.

1.2. Sistematika Penulisan

Delapan bagian besar Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang 2023 ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan, memuat latar belakang, sistematika penulisan dan sumber data:
- Bab II. Konsep dan Definisi, membahas tentang konsep-konsep dan definisi-definisi dari pembahasan;
- Bab III. Kependudukan, memuat data dan ulasan tentang penduduk dan karakteristiknya, keluarga berencana dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan kependudukan;
- Bab IV. Pendidikan, memuat data dan ulasan yang berkaitan dengan pendidikan, seperti tingkat partisipasi sekolah, persentase melek huruf, dan sebagainya;
- Bab V. Kesehatan, memuat data dan ulasan tentang gambaran derajat kesehatan masyarakat beserta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan;
- Bab VI. Ketenagakerjaan, memuat data dan ulasan tentang kondisi angkatan kerja, lapangan usaha dan jenis pekerjaan;
- Bab VII. Perumahan, memuat data dan ulasan tentang kondisi perumahan dan keadaan lingkungan perumahan dan terakhir;
- Bab VIII. Pola Konsumsi, yang memuat data dan ulasan mengenai pengeluaran dan konsumsi rumah tangga;

Setiap pembahasan dilengkapi dengan pengertian konsep dan definisi sebagai landasan teori yang digunakan pada bab tersebut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembaca mengkaji dan menelaah isi pembahasan pada setiap bab.

1.3. Sumber Data

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang 2023 disusun berdasarkan data primer hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan data sekunder dari dinas/instansi terkait. Data utama yang digunakan merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2023 yang dilakukan pada bulan Maret setiap tahunnya, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahun 2023 yang dilakukan pada bulan Agustus setiap tahunnya, serta data dari dinas/instansi terkait yang dikompilasi dari Publikasi Kota Bontang Dalam Angka Tahun 2023 yang juga dapat diakses dari bontangkota.bps.go.id. Selain itu, beberapa data sekunder yang bersumber dari dinas/instansi terkait juga digunakan sebagai pelengkap dan pembanding. Pendataan

SUSENAS dilakukan dua kali dalam setahun, dengan angka kabupaten/ kota diperoleh dari SUSENAS Semester I, sedangkan angka level provinsi diperoleh dari SUSENAS Semester II. Data yang digunakan pada penyusunan publikasi ini adalah hasil SUSENAS Semester I yang dapat menunjukkan estimasi pada level kabupaten/kota. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, data terbaru yang disajikan dalam publikasi ini adalah data tahun berjalan 2023. Beberapa indikator tahun 2023 yang belum dicakup dalam publikasi ini akan dimuat dalam publikasi tahun berikutnya (Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024).



BAB II KONSEP DAN DEFINISI



BAB II. KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi merupakan suatu hal mendasar yang dapat menyebabkan perbedaan penilaian terhadap suatu fenomena. Dalam melakukan kegiatan sensus dan survei, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan suatu konsep dan definisi yang digunakan secara seragam di seluruh Indonesia dan mengacu pada konsep-konsep yang digunakan secara luas di dunia internasional. Hal tersebut dimaksudkan agar kesetaraan perbandingan (apple to apple comparison) antara wilayah di dalam negeri maupun antara negara dapat dilakukan. Beberapa konsep dan definisi yang digunakan di dalam publikasi ini adalah sebagai berikut.

2.1. Kependudukan

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap selama satu tahun atau lebih atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun.

Jumlah penduduk merupakan perpaduan antara kekuatan yang menambah dan yang mengurangi banyaknya penduduk. Kekuatan yang menambah banyaknya penduduk adalah kelahiran dan migrasi masuk (penduduk datang), sedangkan kekuatan yang mengurangi banyaknya penduduk adalah kematian dan migrasi keluar (penduduk pindah).

Migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain baik melewati batas politis negara, batas administrasi, maupun batas bagian dalam suatu negara/region/wilayah provinsi/kab/kota dengan tujuan menetap. Sesuai dengan definisi penduduk di atas, maka seorang migran dapat dianggap sebagai penduduk jika telah tinggal selama satu tahun berturut-turut atau kurang dari satu tahun tetapi dengan tujuan akan menetap di wilayah tertentu.

Perubahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dapat diukur dengan indikator laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan faktor kematian disebut dengan laju pertumbuhan alamiah, sedangkan laju pertumbuhan yang hanya dipengaruhi oleh migrasi disebut dengan laju pertumbuhan sosial.

Berdasarkan usianya, penduduk dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu (1) penduduk usia belum produktif yaitu penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun, (2) penduduk usia produktif yaitu penduduk yang berusia 15—64 tahun, dan (3) penduduk usia tidak produktif yaitu penduduk yang berusia 65 tahun atau lebih.

Berdasarkan tipikal wilayah tempat tinggalnya, penduduk dapat dikategorikan sebagai penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan. Bertambahnya proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di wilayah perdesaan disebut dengan urbanisasi atau lebih sering diartikan sebagai arus perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Kelahiran adalah anak lahir hidup, yaitu anak yang pada waktu dilahirkan menunjukan tanda-tanda kehidupan (seperti jantung berdenyut, bernapas, menangis, dan sebagainya), walaupun mungkin hanya beberapa saat saja. Sedangkan anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan dan pada saat pencacahan/pendataan masih hidup, baik yang tinggal bersama ibunya maupun tinggal di tempat lain. Kematian adalah suatu peristiwa atau keadaan hilangnya tanda-tanda kehidupan dari seseorang.

Khusus untuk penduduk berjenis kelamin wanita, terdapat dua kelompok besar berdasarkan usia, yaitu wanita usia subur dan wanita bukan usia subur. Wanita usia subur adalah wanita yang berada pada masa mampu melahirkan atau masa reproduksi (usia 15—49 tahun), sedangkan di luar rentang usia itu dianggap sebagai wanita bukan usia subur.

Hal yang berkaitan erat dengan wanita usia subur adalah penggunaan alat/cara Keluarga Berencana (KB). Pasangan usia subur yang menggunakan salah satu alat

kontrasepsi/cara KB disebut dengan akseptor. Seseorang dianggap sebagai peserta KB aktif apabila pada saat pencacahan/pendataan masih aktif mengikuti program KB (memakai alat kontrasepsi/cara KB). Yang dimaksud dengan metode kontrasepsi adalah suatu cara/alat yang dipakai untuk mencegah kehamilan.

2.2. Pendidikan

Hal pertama yang terkait dengan pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis. Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis apabila memiliki kemampuan membaca dan menulis kata/kalimat sederhana dengan suatu jenis huruf (misalnya huruf latin, huruf arab, huruf sanskerta, dan sebagainya). Berkaitan dengan hal ini, orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille, dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan sebagai dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf). Berdasarkan hal tersebut, maka penduduk yang dapat membaca dan menulis baik huruf latin, arab, maupun huruf lainnya digolongkan sebagai penduduk melek huruf. Kemampuan menulis dan membaca ini biasanya dihitung untuk penduduk usia 10 tahun ke atas.

Hal berikutnya yang terkait dengan pendidikan adalah jenjang pendidikan atau sekolah. Sekolah yang dimaksud adalah sekolah formal yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementrian Agama mulai dari pendidikan dasar (SD, MI, SMP, MTs), pendidikan menengah (SMA, SMK, MA), pendidikan tinggi (Akademi dan Universitas), serta pendidikan non formal yang setara (paket A, paket B, dan paket C) yang berada di bawah pengawasan Kementrian Pendidikan Nasional, Kementrian Agama, Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta. Pendidikan ini tidak mencakup pendidikan non formal seperti kursus mengetik, komputer, bahasa inggris, Seskoad, Diklatpim dan sebagainya.

Berdasarkan keikutsertaan seseorang pada suatu jenjang pendidikan, terdapat empat definisi penting yaitu (1) tamat sekolah, (2) tidak/belum pernah bersekolah, (3) masih bersekolah, dan (4) tidak bersekolah lagi. Seseorang dikatakan tamat sekolah apabila telah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika mengikuti ujian akhir dan lulus dianggap tamat sekolah.

Seseorang tidak/belum pernah bersekolah, termasuk yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak dan tidak/belum melanjutkan ke Sekolah Dasar, maka dikategorikan sebagai tidak/belum pernah bersekolah. Namun, apabila seseorang sedang mengikuti pendidikan di salah satu jenjang pendidikan (SD, SLTP, SLTA, atau perguruan tinggi), maka dikategorikan sebagai masih bersekolah. Sedangkan seseorang pernah mengikuti jenjang pendidikan baik SD, SLTP, SLTA, maupun perguruan tinggi, dan pada saat pencacahan sudah tidak aktif lagi, maka dikategorikan sebagai tidak bersekolah lagi.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang baik sudah tamat maupun tidak/belum tamat. Penduduk putus sekolah adalah mereka yang tidak dapat menamatkan suatu jenjang pendidikan.

Masing-masing jenjang pendidikan disetarakan dengan kelompok usia penduduk. Jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) disesuaikan dengan penduduk berusia 7—12 tahun, SLTP dengan penduduk berusia 13—15 tahun, SLTA dengan penduduk berusia 16—18 tahun, dan perguruan tinggi dengan penduduk berusia 19—23 tahun. Oleh sebab itu, usia 7—23 tahun dianggap sebagai usia sekolah. Sedangkan pendidikan prasekolah diselenggarakan selama satu sampai dua tahun bagi anak usia 5—6 tahun, yang merupakan persiapan sebelum memasuki Sekolah Dasar.

2.3. Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya.

Menderita sakit adalah mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari (tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya). Sedangkan cara pengobatan adalah perlakuan/cara yang ditempuh oleh seseorang apabila menderita suatu penyakit, seperti pergi ke dokter praktik, rumah sakit, puskesmas dan tenaga kesehatan lainnya, atau berusaha mengobati sendiri.

2.4. Ketenagakerjaan

Dalam konsep ketenagakerjaan, penduduk dibagi menjadi dua golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas, dan penduduk bukan usia kerja adalah penduduk berusia kurang dari 15 tahun. Penduduk usia kerja pun dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja atau yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan penduduk yang menganggur. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi karena bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti). Pengukuran bekerja atau tidak ini dilakukan berdasarkan periode rujukan (*time reference*) yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu yang dihitung mundur mulai sehari sebelum hari pencacahan.

Seseorang dikatakan bekerja apabila melakukan kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut boleh dilakukan baik secara berturut-turut/tidak terputus maupun kumulatif satu jam dalam seminggu. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan bagi karyawan/pegawai/pekerja dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Seseorang dikategorikan mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja apabila mereka yang punya pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu terakhir tidak bekerja karena suatu sebab seperti sakit, cuti, mogok, menunggu panen dan lain-lain. Termasuk ke dalam konsep bekerja adalah orang yang sementara tidak bekerja.

Seseorang dikatakan menganggur apabila tidak bekerja, tidak juga sementara tidak bekerja, dan atau mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru. Mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan, termasuk kegiatan menunggu jawaban lamaran. Sedangkan mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan. Termasuk juga orang yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

Hari kerja adalah waktu yang dinyatakan dalam hari yang dipergunakan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan bekerja paling sedikit selama satu jam terus menerus. Jam kerja adalah waktu yang dinyatakan dalam jam yang dipergunakan untuk bekerja. Jam kerja normal adalah 40 jam perminggu.

2.5. Perumahan

Bangunan tempat tinggal yang dikuasai oleh rumah tangga merupakan suatu bangunan fisik yang memiliki lantai, dinding, dan atap. Lantai adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik yang terbuat dari marmer/keramik/granit, tegel/teraso, semen, kayu, tanah, atau lainnya. Luas lantai yang menjadi objek di dalam survei adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap).

Atap rumah adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga anggota rumah tangga yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut. Sedangkan dinding rumah adalah sisi luar/batas suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain.

Beberapa indikator lain yang terkait dengan kondisi perumahan rumah tangga adalah status penguasaan bangunan tempat tinggal, sumber penerangan utama yang digunakan, sumber air minum utama, dan penggunaan fasilitas tempat buang air besar.

2.6. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga selama sebulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan yang mencakup semua barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga baik yang berasal dari pembelian, pemberian oleh pihak lain, maupun dari produksi sendiri. Konsumsi rumah tangga hanya terbatas pada barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak termasuk pengeluaran untuk usaha atau diberikan kepada pihak lain.

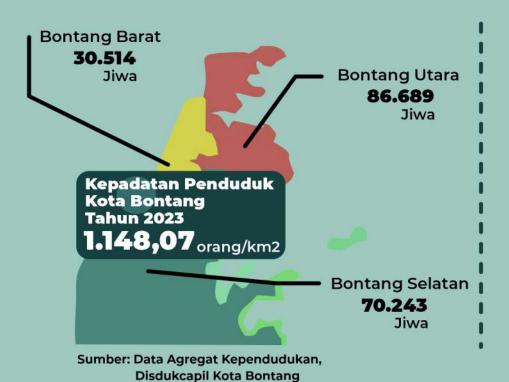


Laju Pertumbuhan Penduduk 2022-2023

1,35%

Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020 tahun 2020-2035











Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020 Tahun 2020-2035

BAB III. KEPENDUDUKAN

Salah satu subjek pembangunan adalah masalah kependudukan. Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Kependudukan dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan. Selain sebagai subjek, penduduk berperan sebagai penggerak pembangunan dan juga objek pembangunan. Idealnya, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dinikmati hasilnya bagi peningkatan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mempertimbangkan kondisi kependudukan termasuk di dalamnya kapasitas penduduk suatu wilayah.

Aspek yang perlu diperhatikan terkait kependudukan salah satunya adalah struktur penduduk yaitu distribusi penduduk menurut kelompok umur. Struktur penduduk menjadi penting karena perilaku dan kebutuhan ekonomi manusia akan berubah sesuai dinamika kondisi penduduk. Selain itu, mengetahui struktur penduduk di suatu wilayah dapat membantu mengidentifikasi apakah suatu ekonomi memiliki keuntungan demografi.

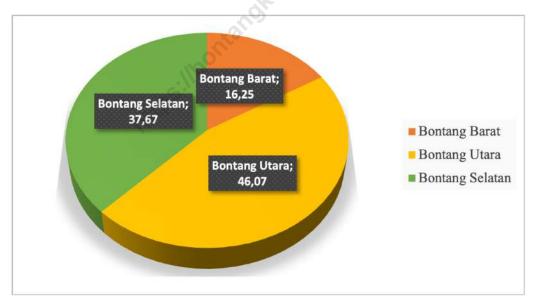
Berbicara tentang masalah penduduk, diharapkan pembangunan tidak hanya terpaku pada kuantitas namun juga kualitas penduduk suatu wilayah. Dikarenakan penduduk juga merupakan subjek pembangunan, kualitas penduduk juga perlu diperhatikan. Jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas penduduk yang rendah akan menjadi beban dan akan menghambat jalannya proses pembangunan. Sebaliknya jika jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas penduduk yang baik, maka dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pembangunan berwawasan kependudukan merupakan salah satu cara agar potensi penduduk dapat berperan aktif dalam proses pembangunan.

Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal, perencanaan berasal dari bawah, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Berkaitan dengan pentingnya posisi kependudukan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, maka data kependudukan sangat dibutuhkan dalam penentuan kebijakan maupun perencanaan program kependudukan. Data kependudukan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan yang telah, sedang, maupun yang akan diterapkan.

Pada tahun 2020-2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi (the windows of opportunity). Bonus demografi diartikan sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan banyaknya penduduk usia produktif disertai dengan menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang (Wongboonsin et. al. 2003). Bonus demografi terjadi karena penurunan kelahiran yang dalam jangka panjang sehingga menurunkan proporsi penduduk muda (Ross, 2004). Pada periode ini, belanja publik yang semula diperuntukkan bagi program-program sosial dapat dialihkan untuk mlelakukan investasi pada sektor-sektor produktif dan infrastruktur. Selain keuntungan yang akan diperoleh, Pemerintah juga perlu waspada akan sisi negatif adanya bonus demografi. Bonus demografi berpotensi menciptakan masalah lingkungan karena adanya peningkatan aktivitas manusia dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Salah satu dampak yang akan timbul adalah eksploitasi alam dan limbah meningkat. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kesadaran setiap penduduk akan lingkungan dengan menggalakan gerakan Go Green. Tantangan yang akan dihadapi selanjutnya adalah tingkat pengangguran sehingga dibutuhkan strategi dan koordinasi pemangku kepentingan dalam satu kolaborasi. Menyadari kondisi dan tantangan tersebut, strategi yang dapat ditempuh pemerintah, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keahlian tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan mendorong fleksibilitas dan mobilitas tenaga kerja untuk keluar masuk pasar kerja tanpa terdampak besar pada kesejahteraan. Untuk melakukan ini semua perlu kerjasama dari semua pihak baik pemerintah, industri, dan seluruh warga negara.

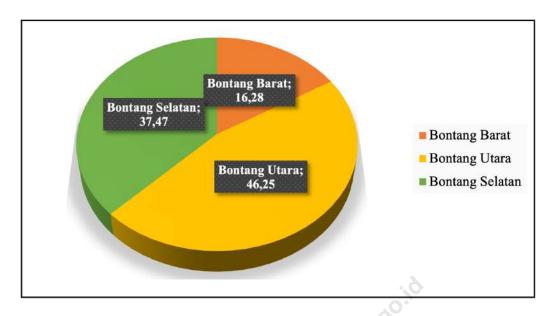
3.1. Profil Persebaran dan Pertumbuhan Penduduk

Kota Bontang yang terdiri dari 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan, memiliki luas wilayah sebesar 161,88 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebesar 185.850 jiwa hasil Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik. Penduduk Kota Bontang tersebar di ketiga kecamatan dengan sebesar 46,25 persen berada di Kecamatan Bontang Utara, sebesar 37,47 persen di Kecamatan Bontang Selatan, dan sisanya sebesar 16,28 persen berada di Kecamatan Bontang Barat pada tahun 2023 menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.



Sumber: Data Agregat Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

Gambar 3.1 Persentase Persebaran Penduduk Kota Bontang, 2022



Sumber: Data Agregat Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

Gambar 3.2 Persentase Persebaran Penduduk Kota Bontang 2023

Berdasarkan kepadatannya, Kecamatan Bontang Utara memiliki kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan dengan kedua kecamatan lainnya yaitu sebesar 2.593,58 jiwa/ km² untuk tahun 2022 dan sebesar 2.624,55 jiwa/ km² untuk tahun 2023. Sedangkan Kecamatan Bontang Barat sebesar 1.684,28 jiwa/ km² pada tahun 2022 dan sebesar 1.700,89 jiwa/ km² pada tahun 2023. Terakhir, Kecamatan Bontang Selatan memiliki kepadatan penduduk sebesar 631,56 jiwa/ km² pada tahun 2022 dan 633,33 jiwa/ km² pada tahun 2023. Kota Bontang juga merupakan Kota dengan banyak pulau kecil yaitu sebanyak 22 pulau, dengan 3 pulau yang berpenghuni seperti Pulau Melahing, Tihi-Tihi, dan Gusung.

Penduduk Kota Bontang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Proyeksi Penduduk BPS 2010-2035 tercatat penduduk Kota Bontang pada tahun 2016 adalah sebanyak 166.868 jiwa. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2023 sebesar 185.850 jiwa berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020. Sementara, laju pertumbuhan penduduk tahunan berdasarkan hasil proyeksi

penduduk cenderung mengalami perlambatan sejak empat tahun terakhir dari tahun 2018-2021 dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3.3



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bontang, 2018-2023

Pertambahan jumlah penduduk turut berpengaruh terhadap meningkatnya kepadatan penduduk. Adanya perubahan luas wilayah Kota Bontang pada tahun 2017 dengan memasukkan pulau-pulau kecil, berdampak pada menurunnya kepadatan penduduk tahun 2017 dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 1.054 jiwa/km². Namun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kepadatan penduduk Kota Bontang tahun 2023 mencapai 1.148,07 jiwa/km².

Tabel 3.1 Indikator Demografi Kota Bontang, 2020-2023

Indikator Demografi	2020¹	2021²	2022²	2023²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Penduduk (orang)	178.917	180.920	183.370	185.850
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,95	1,12	1,35	1,35
Rasio Jenis Kelamin (persen)	108	107	107	106
Kepadatan Penduduk (orang/km²)	1.105	1.118	1.133	1.148
Komposisi Penduduk (persen)		55.0	0.	
0-14 tahun	26,48	26,13	25.84	25.60
15-64 tahun	70,40	70,45	70.45	70.38
65+ tahun	3,12	3,41	3.71	4,02
Angka Beban Ketergantungan	42,04	41,93	41,95	42,08

Catatan: ¹ Angka hasil perapihan umur dari data administratif dan Sensus Penduduk 2020 (September)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Struktur penduduk dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin dan umur. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kota Bontang masih di dominasi oleh penduduk laki-laki. Hal ini terlihat pada angka Rasio Jenis Kelamin (RJK) Kota Bontang Tahun 2023 sebesar 106. Nilai ini dapat diartikan bahwa terdapat 106 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. RJK Kota Bontang tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun struktur penduduk berdasarkan umur dapat dibagi menjadi kelompok umur produktif dan tidak produktif. Umur produktif adalah umur pada angkatan kerja yaitu 15-64 tahun. Penduduk di umur ini

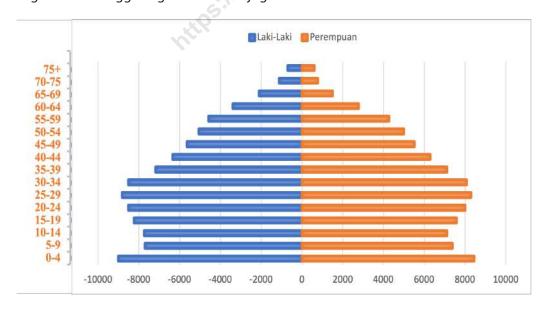
² Angka proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2020 Tahun 2020-2035

diharapkan memiliki peluang besar untuk bekerja dan menghasilkan nilai ekonomi untuk mendorong kegiatan ekonomi di Kota Bontang. Sedangkan penduduk tidak produktif adalah penduduk pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Penduduk pada kelompok umur ini adalah penduduk umur bersekolah dan lansia yang memiliki kemungkinan kecil untuk menghasilkan nilai ekonomi.

Penduduk Kota Bontang dari tahun 2020 hingga 2023 masih di dominasi oleh penduduk produktifyang dari tahun ke tahunnya. Tercatat pada tahun 2020 sebesar 70,40 persen penduduk Kota Bontang berusia 15-64 tahun. Angka ini kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 70,45 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 70,38 persen. Sejalan dengan meningkatnya persentase penduduk usia produktif, maka semakin menurun persentase penduduk tidak produktif, begitupun sebaliknya. Hal ini ditandai dengan Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) yang semakin menurun dari tahun 2020 ke tahun 2021. Angka Beban Ketergantungan Kota Bontang pada tahun 2020 adalah sebesar 42,04 persen dan menurun menjadi 41,93 persen pada tahun 2021. Sebaliknya, angka beban ketergantungan mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 42,08 persen. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat 42 sampai 43 penduduk tidak produktif yang akan di tanggung per 100 penduduk usia produktif di Kota Bontang

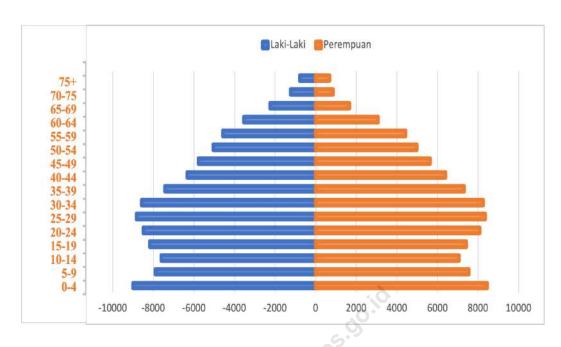
Berkaitan dengan komposisi penduduk, persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun terus mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir yaitu menjadi sebesar 25,60 persen pada tahun 2023. Hal ini berbanding terbalik pada penduduk kelompok umur 65 tahun ke atas, yang mana cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 proporsi penduduk lansia tercatat sebesar 4,02 persen. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa umur harapan hidup penduduk Kota Bontang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta adanya perbaikan fasilitas kesehatan untuk penduduk lansia.

Komposisi penduduk secara lebih detil dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Piramida penduduk disajikan dalam bentuk grafik batang dengan satu sisi menunjukkan penduduk laki-laki dan di sisi lainnya menunjukkan penduduk perempuan. Pada umumnya terdapat tiga buah bentuk pramida penduduk. Pertama adalah *Expansive* di mana bentuk piramida yang sebagian besar komposisi penduduknya berada pada usia muda. Kedua *Stationer* yaitu bentuk piramida yang bentuknya hampir rata komposisi penduduknya di setiap kategori dewasa. Terakhir adalah *Constructive* di mana piramida yang sebagian besar penduduknya berada pada usia tua yang membentuk pola batu nisan. Bentuk piramida pada negara berkembang sebagian besar berbentuk pola *Expansive*. Hal ini disebabkan karena angka kelahiran di Negara berkembang masih tinggi dan asilitas kesehatan yang mulai cukup baik. Sementara piramida di Negara maju sebagian besar berbentuk *Constructive* di mana kelahiran cukup rendah dan fasilitas penunjang kesehatan sudah sangat baik sehingga angka mortalitas juga rendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 Tahun 2020-2035

Gambar 3.4 Piramida Penduduk Kota Bontang, 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 Tahun 2020-2035

Gambar 3.5 Piramida Penduduk Kota Bontang, 2023

Bentuk piramida penduduk Kota Bontang berbentuk *Expansive*, yang bermakna sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Hal ini dapat ditunjukkan pada Gambar 3.4 dan Gambar 3.5 oleh jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan pada usia 0-34 tahun jumlahnya paling besar, terlebih pada usia 0-4 tahun merupakan porsi jumlah yang paling besar ditunjukkan dengan diagram batang yang paling panjang. Dengan banyaknya penduduk usia 0-4 tahun ini mengindikasikan banyaknya balita dan masih tingginya kelahiran di Kota Bontang selama tahun beberapa tahun ke belakang sampai tahun 2023. Meningkatnya penduduk produktif dibandingkan dengan penduduk non produktif, identik dengan kondisi bonus demografi. Hal ini haruslah dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk menentukan arah pembangunan Kota Bontang pada periode ke depan seiring menuju puncak bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada sekitar tahun 2045. Proporsi penduduk produktif yang lebih besar daripada penduduk usia tidak produktif bermakna tingkat ketergantungan menjadi lebih rendah, yang diharapkan dapat menjadi nilai tambah ekonomi dan sosial penduduk yang mengarah kepada

keluarga yang lebih sejahtera. Bonus demografi yang tidak datang dua kali ini benarbenar harus dimanfaatkan dan dipersiapkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, agar tidak menjadi *boomerang* yang menyebabkan permasalahan lebih kompleks pada penduduk usia produktif seperti banyaknya pengangguran yang justru akan menyebabkan ketergantungan yang tinggi dan menghambat kesejahteraan.

3.2. Fertilitas dan Keluarga Berencana

Komposisi penduduk selain dipengaruhi oleh migrasi, juga dapat dipengaruhi oleh fertilitas (kelahiran) dan mortalitas (kematian) yang terjadi secara alamiah. Angka fertilitas yang tinggi dan tidak terkontrol dapat mengakibatkan adanya ledakan penduduk bagitu pula jika angka fertilitas yang terlalu rendah. Pola fertilitas pada negara berkembang biasanya lebih besar dibandingkan dengan negara maju yang cenderung memiliki angka fertilitas yang kecil. Begitu pula Indonesia yang saat ini tengah mengontrol angka fertilitas dengan kebijakan KB yang sudah dilakukan sejak akhir tahun 1970-an. Hasil dari kebijakan ini dapat dikatakan berhasil menekan angka fertilitas yang tinggi menjadi rendah.

Mortalitas dapat dilihat dari indikator Angka Harapan Hidup penduduk yang lahir di tahun tersebut. Semakin besar angka mortalitas akan memengaruhi angka harapan hidup yang rendah terhadap penduduk yang lahir di tahun tersebut. Pola angka mortalitas pada negara berkembang cenderung lebih besar dibandingkan dengan negara maju. Hal ini dapat ditunjukkan dengan angka harapan hidup yang lebih kecil dibandingkan dengan negara maju. Banyak faktor yang memengaruhi angka mortalitas beberapa diantaranya adalah fasilitas kesehatan, pola hidup sehat masyarakat, angka kesakitan, dan ketersediaan tenaga medis yang memadai.

Fertilitas sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk usia produktif, status perkawinan, usia perkawinan pertama, dan kebiasaan atau budaya maupun faktor agama yang memengaruhi

seseorang cenderung memiliki anak banyak. Perhitungan indikator fertilitas dilakukan pada penduduk usia 10 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa pada usia tersebut seseorang sudah mulai berpeluang untuk bereproduksi. Kemampuan reproduksi sendiri ditandai dengan perkawinan yang bukan hanya saja perkawinan sah namun juga perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dianggap suami-istri oleh masyarakat sekitarnya. Tabel berikut menunjukkan proporsi penduduk berdasarkan status perkawinan.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan di Kota Bontang, 2022-2023

Status		2022			2023		
Perkawinan	Laki-laki	Perem- puan	Total	Laki-laki	Perem- puan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Belum Kawin	43,19	33,94	38,74	40,56	33,8	37,28	
Kawin	53,22	56,67	54,88	55,40	58,42	56,87	
Cerai Hidup	1,63	2,54	2,07	2,08	2,31	2,19	
Cerai Mati	1,96	6,85	4,31	1,96	5,47	3,66	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Kota Bontang pada tahun 2022 dan 2023 memiliki proporsi penduduk 10 tahun ke atas yang sudah atau pernah menikah lebih besar dibandingkan dengan yang belum menikah. Persentase penduduk yang berstatus kawin pada tahun 2022 yaitu sebesar 54,88 persen dan 56,87 persen pada tahun 2023. Perbedaan persentase antar tahun ini disebabkan oleh pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret antar tahun melibatkan sampel responden yang berbeda, yang menyebabkan perbedaan estimasi angka agregat, namun tetap dalam rentang toleransi statistik. Sehingga secara umum, persentase penduduk kawin ada pada angka sekitar 50 sampai 60 persenan.

Dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, penduduk yang berstatus kawin di Kota Bontang Tahun 2023 lebih banyak pada perempuan yaitu sebesar 58,42 persen, sedangkan penduduk laki-laki yang berstatus kawin 55,40 persen. Hal ini bermakna, penduduk perempuan lebih banyak yang berstatus kawin dibanding yang laki-laki. Pola yang sama terdapat pula pada status cerai hidup dan cerai mati yang angkanya lebih besar pada perempuan dibandingkan laki-laki.

Fertilitas erat hubungannya dengan wanita usia subur dan umur perkawinan pertama. Semakin muda seorang wanita menikah, maka umur reproduksinya pun akan semakin panjang. Artinya semakin muda usia wanita menikah maka akan berpeluang memiliki anak yang lebih banyak dibandingkan dengan wanita usia subur yang menikah di umur yang lebih tua. Hal ini tentu akan mempengaruhi struktur dan komposisi penduduk yang ada. Indonesia sendiri sudah mencanangkan umur minimal pria dan wanita untuk menikah. Maraknya pernikahan di bawah umur serta mempertimbangkan besarnya risiko yang ditanggung dari perilaku tersebut secara kesehatan dan ekonomi, maka dilakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7. Peraturan semula menyebutkan perkawinan hanya diizinkan pada pria yang mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Batas umur ini kemudian berubah menjadi minimal 19 tahun untuk pihak wanita dan pria sebagaimana tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Secara rata-rata, umur kawin pertama penduduk di Kota Bontang pada tahun 2022 adalah 23,6 tahun. Kemudian pada tahun 2023 angka ini mengalami peningkatan menjadi 23,81 tahun. Apabila dilihat dari nilai tengah, median umur kawin pertama penduduk di Kota Bontang adalah 23 tahun pada 2022 dan angkanya mengalami peningkatan pada 2023 menjadi sebesar 24 tahun. Penduduk dengan umur perkawinan pertama yang kurang ketentuan UU atau 19 tahun perlu diperhatikan.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Umur Pertama Perkawinan di Kota Bontang, 2022-2023

Kelompok Umur Perkawinan Pertama	2022	2023
(1)	(2)	(3)
<19	14,01	11,66
19 ke atas	85,99	88,34

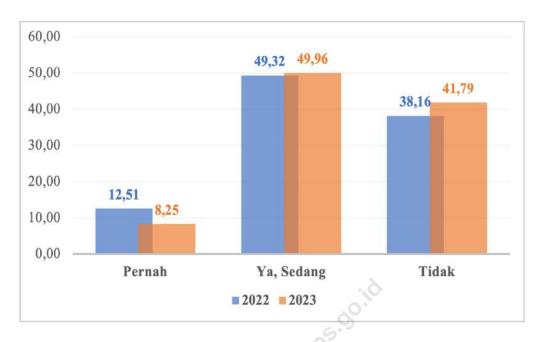
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Pada tahun 2022 di Kota Bontang terdapat 14,01 persen penduduk yang melaksanakan perkawinan pertama dibawah umur 19 tahun. Angka ini kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 11,66 persen. Sementara, proporsi penduduk dengan umur perkawinan pertama 19 tahun ke atas adalah sebesar 85,99 persen pada 2022 dan meningkat menjadi 88,34 persen pada tahun berikutnya. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Kota Bontang dalam dua tahun terakhir melakukan perkawinan pertama sesuai dengan UU yakni minimal 19 tahun. Kendati demikian masih penduduk yang melakukan perkawinan pertama kurang dari 19 tahun, sehingga masih dibutuhkan peran serta pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan pernikahan dari pasangan-pasangan tersebut.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang pernah ditempuh, pada tahun 2023 penduduk dengan umur perkawinan pertama kurang dari 19 tahun sebagian besar adalah penduduk yang memiliki pendidikan tertinggi setingkat SD kebawah sebesar 46,54%. Disamping itu, penduduk yang pernah/sedang menempuh pendidikan tertinggi pada jenjang SMP dan SMA/SMK dengan persentase berturutturut sebesar 29,15% dan 21,06%. Sisanya pernah/sedang menempuh pendidikan lebih dari SMA/SMK. Sementara itu penduduk dengan umur perkawinan pertama 19 tahun ke atas pada tahun 2023 sebagian besar pernah/sedang menempuh pendidikan tertinggi SMA/SMK dengan persentase sebesar 48,81%. Selanjutnya penduduk yang pernah/

sedang menempuh pendidikan lebih dari SMA/SMK sebesar 20,79%. Sementara itu, sisanya pernah/sedang menempuh pendidikan tertinggi pada jenjang SD kebawah dan SMP dengan persentase berturut-turut sebesar 17,03% dan 13,37%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa semakin dini usia pernikahan, maka identik dengan minimnya pendidikan yang di tempuh. Di Kota Bontang sendiri praktik menikah dini nampaknya masih dipraktikkan yang sebagian besar dilandasi dengan kebiasaan pada suku tertentu untuk menikah dini. Pernikahan dini bukanlah hal yang kecil untuk dibiarkan. Terdapat dampak secara kesehatan, mental dan psikis pada wanita yang menjalaninya dan juga dampak sosial ekonomi.

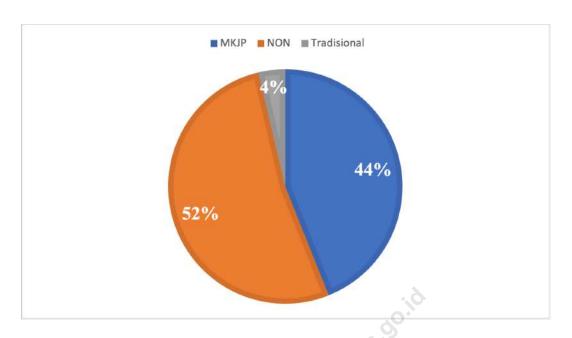
Selain memperhatikan umur perkawinan pertama pada kelompok penduduk khususnya wanita usia subur, program pemerintah yang telah berjalan hingga saat ini dalam mengontrol fertilitas adalah Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak, dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi / KB yang memiliki berbagai jenisnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Target utama untuk kepesertaan KB adalah dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD dan implan. Seiring dengan meningkatnya cakupan KB, diharapkan laju pertumbuhan penduduk dapat dikontrol dengan baik.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 3.6 Persentase Wanita Usia Subur Pernah Kawin Menurut Pemakaian KB di Kota Bontang, 2022-2023

Berkaitan dengan hal ini, adapun proporsi wanita usia subur yang pernah kawin dan sedang menggunakan KB pada tahun 2023 sebesar 49,96 persen. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu 49,32 persen. Sebaliknya, proporsi yang pernah menggunakan KB pada tahun 2023 adalah sebesar 8,25 persen. Angka ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 12,51 persen. Adapun proporsi wanita usia subur yang pernah kawin dan yang tidak pernah menggunakan KB mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 41,79 persen. Berbagai alasan dan faktor pendorong yang membuat masih adanya wanita usia subur pernah kawin yang tidak menggunakan KB berkaitan dengan alasan fertilitas dan takut akan efek samping dari penggunaan KB.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 3.7 Persentase Wanita Pernah Kawin Menurut Jenis KB di Kota Bontang, 2023

Dari seluruh wanita usia subur pernah kawin yang sedang menggunakan KB pada tahun 2023, sebesar 44 persen yang menggunakan jenis KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Sedangkan sebesar 52 persen memilih untuk berkontrasepsi jenis Non MKJP, dan 4 persen menggunakan jenis KB Tradisional.

Jenis KB MKJP terdiri dari tubektomi (sterilisasi wanita), vasektomi (sterilisasi pria), IUD (*Intrauterine Device*) atau KB Spiral, dan susuk KB (*implant*). Jenis KB Non-MJKP terdiri dari suntilkan, pil KB, dan penggunaan kondom. Sementara jenis KB tradisional terdiri dari metode menyusui alami, pantang berkala/kalender, dan jenis KB tradisional lainnya.

Pilihan alat/cara KB oleh akseptor di antaranya dipengaruhi oleh harga, ketersediaan dan kemudahan untuk mengakses alat/cara tersebut. Jika terjadi kenaikan harga alat kontrasepsi yang tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan, maka peluang pemakaian alat kontrasepsi juga akan mengalami penurunan. Begitu pula dengan ketersediaan dan kemudahan akses untuk mendapatkan alat kontrasepsi.

Semakin mudah akses dalam mendapatkan fasilitas kontrasepsi, maka cenderung alat kontrasepsi tersebut digunakan.

Diantara pengguna KB, nampaknya KB dengan IUD/KB Spiral dan suntikan menjadi pilihan sebagian besar penduduk Kota Bontang dengan persentase pada tahun 2023 berturut-turut sebesar 28,06 persen dan 27,00 persen. Selanjutnya diikuti dengan penggunaan Pil KB sebesar 15,20 persen, pemakaian kondom sebesar 10,16 persen, cara lain termasuk metode sterilisasi tubektomi sebesar 7,71 persen dan susuk KB sebesar 7,55 persen. Adapun jenis tradisional mencakup metode menyusui alami dan pantang berkala/kalender.

https://pontainglyota.bps.go.id









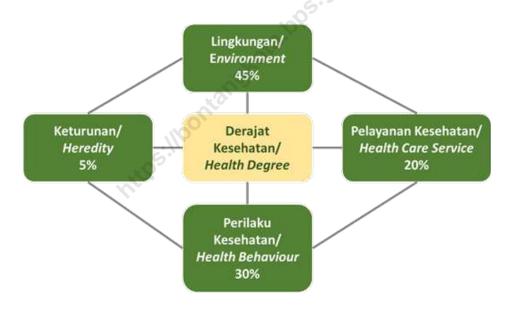
Rata-Rata Lama Sakit dan Angka Kesakitan menurut Jenis Kelamin



https://pontainglyota.bps.go.id

BAB IV. KESEHATAN

Kondisi umum kesehatan di Indonesia digambarkan dalam derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat dapat dicerminkan melalui beberapa indikator terpilih, seperti angka harapan hidup, angka kesakitan, angka kematian, dan status gizi. Kesehatan masyarakat bukan hanya berasal dari sektor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor demografi seperti ekonomi dan pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor keturunan. Menurut Teori Derajat Kesehatan yang dikembangkan oleh Hendrik L. Blum menjawab hubungan ini dalam sebuah diagram.



Gambar 4.1 Analisis Derajat Kesehatan Hendrik L. Blum

L. Blum mengembangkan teori derajat kesehatan yang mempertimbangkan pengaruh empat determinan yang saling terkait yaitu lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Lingkungan merupakan determinan yang paling dominan memengaruhi derajat kesehatan yaitu sebesar 45 persen. Perilaku kesehatan memiliki pengaruh 30 persen, pelayanan kesehatan 20 persen, dan keturunan 5 persen. Lingkungan memberikan pengaruh yang tinggi karena berhubungan langsung dengan

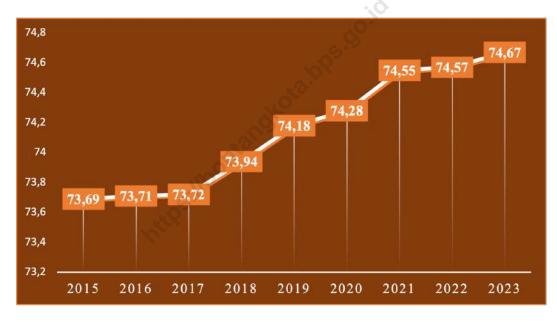
masyarakat. Lingkungan umumnya dibagi menjadi dua aspek yaitu fisik dan sosial. Lingkungan yang menyangkut aspek fisik seperti sampah, air, udara, tanah, iklim, dan perumahan. Sementara lingkungan yang menyangkut aspek sosial meliputi kebudayaan, pendidikan, dan ekonomi. Contoh indikator lingkungan dalam aspek fisik yang mudah diukur adalah ketersediaan sanitasi layak dan air bersih. Perilaku merupakan faktor kedua yang memengaruhi derajat kesehatan, mencakup perilaku individu, keluarga, maupun masyarakat. Perlaku hidup yang sehat tentunya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perilaku dipengaruhi oleh kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, pendidikan, tingkat sosial, dan tingkat ekonomi yang melekat pada individu.

Pelayanan kesehatan adalah faktor ketiga yang mempengaruhi situasi derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan sangat menentukan pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan, dan pengobatan terhadap penyakit, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan harus diimbangi dengan kemudahan akses dan ketersediaan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan dan informasi kesehatan. Faktor terakhir adalah keturunan yaitu faktor yang melekat dalam individu yang dibawa sejak lahir seperti penyakit genetik (Dinas Kesehatan Cilacap, 2014).

Adapun RPJMD Kota Bontang 2021-2026 turut mencantumkan tujuan yang berkaitan dengan aspek kesehatan yaitu "Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Kesehatan". Tujuan ini diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pusat pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan menurunnya penyebaran penyakit menular maupun tidak menular. Berikut merupakan beberapa indikator kesehatan yang menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat di Kota Bontang pada tahun 2022 dan 2023.

4.1. Perkembangan Angka Harapan Hidup, Angka Kesakitan, dan Rata-Rata Lama Sakit

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Kesehatan 2015-2019, disebutkan bahwa sasaran pembangunan kesehatan tahun 2025 yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang dicerminkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH), menurunnya angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan prevalensi kurang gizi pada balita. Adapun perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir bagi penduduk Kota Bontang ialah sebagai berikut.

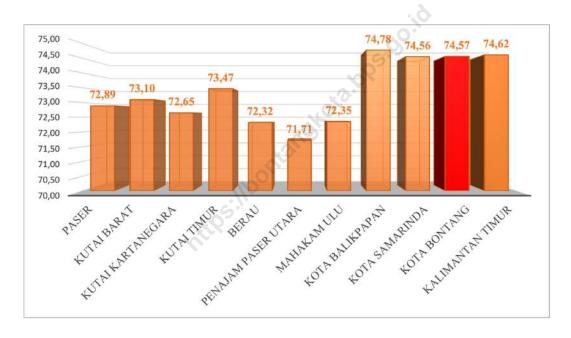


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Gambar 4.2 Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kota Bontang, 2015-2023

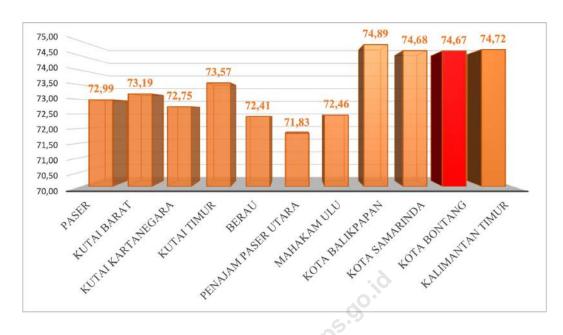
Tercatat Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kota Bontang meningkat dari tahun ke tahunnya dari 73,69 tahun pada tahun 2015 menjadi 74,67 tahun pada tahun 2023. Artinya pada tahun 2023, secara rata-rata bayi yang baru lahir di tahun ini memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 74 hingga 75 tahun. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Meskipun terdapat tren UHH yang meningkat, namun Pemerintah Kota Bontang masih perlu memertahankan dan lebih

membenahi fasilitas-fasilitas dan pelayanan kesehatan di Kota Bontang. Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Bontang jika dibandingkan dengan UHH kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur menduduki peringkat ketiga setelah Kota Balikpapan yaitu sebesar 74,89 dan Kota Samarinda sebesar 74,68 pada 2023. Meskipun begitu, Umur Harapan Hidup Kota Bontang masih di bawah UHH Provinsi Kalimantan Timur sebesar 74,72. Jika dilihat pada grafik di bawah terdapat sekilas pola yang dapat ditangkap, dimana UHH wilayah kota lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Hal ini kemudian dapat dikaitkan dengan adanya akses kesehatan yang cenderung lebih mudah pada wilayah kota.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

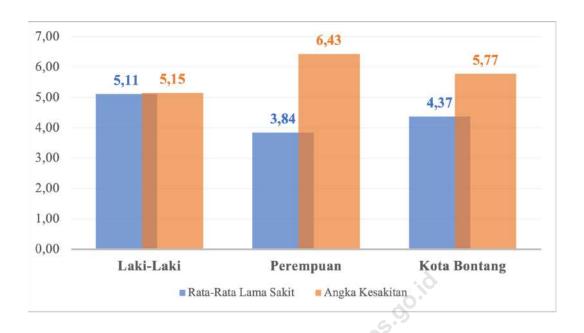
Gambar 4.3 Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Gambar 4.4 Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2023

Kondisi kesehatan masyarakat di Kota Bontang dapat digambarkan oleh Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit. Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam susenas, Angka Kesakitan (Mordibitas) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/ napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dan lain-lain. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan maka semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut. Rendahnya derajat kesehatan dapat dilihat dengan tingginya Angka Kesakitan. Adapun Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit Kota Bontang sebagai berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.5 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit Kota Bontang, 2023

Melalui Gambar 4.5 dapat ditunjukkan Angka Kesakitan Kota Bontang yang tercatat sebesar 5,77 di mana artinya rata-rata dalam sebulan terdapat 5 sampai 6 penduduk dari 100 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas sehari-hari. Adapun Rata-rata Lama Sakit penduduk Kota Bontang dalam setahun sebesar 4,37 hari atau berkisar 4 sampai 5 hari. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki memiliki Angka Kesakitan yang lebih kecil dibandingkan dengan penduduk perempuan yaitu sebesar 5,15. Artinya sekitar 5 sampai 6 penduduk dari 100 penduduk laki-laki mengalami keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, sedangkan pada penduduk perempuan sebesar 6,43 atau sekitar 6 sampai 7 penduduk dari 100 penduduk perempuan mengalami keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Untuk rata-rata lama sakit dalam setahun, penduduk laki-laki memiliki rata-rata lama sakit yang lebih lama yaitu 5,15 hari, sedangkan pada penduduk perempuan 3,84 hari. (Susenas Maret 2023, diolah).

Tabel 4.1 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kota Bontang, 2022-2023

		2022	2023			
Berobat Jalan	Laki-laki	Perem- puan	Total	Laki-laki	Perem- puan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ya	90,37	90,31	90,34	28,02	45,41	37,40
Tidak	9,63	9,69	9,66	71,98	54,59	62,60
Cerai Hidup	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Di antara penduduk yang mengalami gangguan kesehatan terdapat 90,34 persen penduduk yang melakukan berobat jalan pada tahun 2022 dan 37,40 persen pada tahun 2023. Lebih rendahnya persentase penduduk yang berobat jalan pada tahun 2023 dapat disebabkan oleh munculnya kembali ketakutan dan kehati-hatian dalam berobat di karena COVID-19. Hal ini mengingat masih adanya COVID-19 pada tahun 2023 di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh ditemukannya kembali penduduk yang mengalami keluhan kesehatan pada tahun 2023 namun tidak melakukan rawat jalan karena khawatir terpapar Covid-19. Ditunjukkan oleh Tabel 4.2 Kolom 3 (Susenas Maret 2023, diolah). Selain itu, perbedaan persentase alasan tidak berobat jalan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 juga dapat disebabkan oleh perbedaan sampeel responden yang dilibatkan dalam pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret antar tahun sehingga menyebabkan perbedaan estimasi angka agregat, namun tetap dalam rentang toleransi statistik.

Sementara apabila dilihat alasan yang lain, sebagian besar penduduk yang tidak melakukan berobat jalan melakukan melakukan pengobatan sendiri untuk keluhan kesehatannya sebesar 77,10 persen pada tahun 2023. Sementara sisanya, sebesar 21,03% penduduk merasa tidak perlu berobat jalan untuk keluhan kesehatannya dan 1,43% lainnya menganggap bahwa waktu tunggu pelayanan berobat jalan lama. Berikut merupakan tabel alasan penduduk yang tidak berobat jalan.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Menurut Alasan Tidak Berobat Jalan di Kota Bontang, 2022-2023

Alasan Tidak Berobat Jalan	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Tidak punya biaya berobat	6,-	-
Tidak ada biaya transport	8.00	-
Tidak ada sarana transportasi	*3100 -	-
Waktu tunggu pelayanan lama	4.84	1,43
Mengobati sendiri	80.94	77,10
Tidak ada yang mendampingi	-	-
Merasa tidak perlu	14.22	21,03
Khawatir terpapar Covid-19*	-	0,44
Fasilitas Tidak Beroperasi karena Covid-19*	-	-
Lainnya	1,08	-
Total	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

4.2. Fasilitas Kesehatan

Angka Harapan Hidup yang tinggi dan Mordibitas yang rendah sangatlah ditopang dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang disediakan Pemerintah Kota Bontang. Fasilitas kesehatan yang terjangkau oleh semua penduduk dan pelayanan yang prima merupakan kondisi ideal demi menunjang kondisi kesehatan masyarakat, yang perlu Pemerintah Kota Bontang usahakan. Fasilitas kesehatan dapat dilihat dari jumlah Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit, Klinik Bersalin, Apotek, Praktik Dokter Keluarga, dan Posyandu. Berikut perkembangan aksesibilitas fasilitas kesehatan Kota Bontang.

Tabel 4.3 Rasio Sarana Kesehatan Terhadap 10.000 Penduduk Kota Bontang, 2019-2023

Jenis Fasilitas Kesehatan	2019	2020¹	2021²	2022 ²	2023 ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Balai pengobatan /klinik	0,74	0 ,61	0,88	0,87	0,86
Puskesmas	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32
Puskesmas pembantu	0,11	0,11	0,06	0,05	0,05
Rumah sakit	0,23	0 ,28	0,28	0,27	0,27
Klinik Bersalin	0,11	0 ,11	0,11	0,11	0,11
Apotek	0,62	1 ,06	0,61	0,60	0,59
Praktek dokter keluarga	-	2 ,85	1,66	1,64	1,61
Posyandu	6,73	6 ,65	6,75	6,65	6,56

Catatan: ¹ Angka hasil perapihan umur dari data administratif dan Sensus Penduduk 2020 (September)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bontang Dalam Angka Tahun 2023

² Angka proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2020 Tahun 2020-2035

Rasio fasilitas kesehatan terhadap 10.000 peduduk adalah indikator yang dapat menggambarkan tingkat ketersediaan fasilitas termasuk dalam hal kemudahan akses penduduk terhadap suatu fasilitas kesehatan. Di Kota Bontang tahun 2023 rasio Posyandu terhadap 10.000 penduduk ialah sebesar 6,56. Artinya setiap terdapat 10.000 penduduk tersedia sekitar 6-7 posyandu yang dapat melayani.

Selanjutnya, rasio rumah sakit di Kota Bontang per 10.000 penduduk ialah 0,27. Adapun rasio yang di bawah 1, artinya belum terdapat 1 fasilitas per 10.000 penduduk, sehingga harus diperluas skala penghitungannya. Dalam hal ini, jumlah rumah sakit saat dirasio per 100.000 penduduk maka angkanya menjadi 2,7 yang artinya terdapat 2-3 rumah sakit yang dapat melayani setiap 100.000 penduduk. Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan diharapkan dapat mempermudah masyarakat Kota Bontang untuk mengaksesnya. Semakin mudah di akses maka di harapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dari segi kuratif atau pertolongan kesehatan. Adapun pelayanan kesehatan yang prima juga penting dalam menunjang peningkatan kesehatan masyarakat Kota Bontang. Salah satu pelayanan kesehatan saat ini adalah adanya Kartu BPJS PBI maupun NON PBI. BPJS PBI atau Penerima Bantuan luran adalah kartu kesehatan yang diberikan Pemerintah untuk membantu masyrakat yang kurang mampu dalam mengakses kesehatan.

Jaminan Kesehatan merupakan bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan berdasarakan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Adapun penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan di Kota Bontang Tahun 2023 adalah sebesar 82,79 persen (Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang Tahun 2023).

Nampaknya setengah lebih penduduk Kota Bontang sudah menggunakan fasilitas pada berobat jalan. Hal ini juga tergambarkan apabila dilihat dari kelompok

penduduk berdasarkan pengeluaran. Pada penduduk dengan kuintil pengeluaran 20 persen teratas sebesar 100,00 persennya menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Pada penduduk dengan kuintil pengeluaran 40 persen menengah sebesar 76,30 persen dan pada penduduk 40 persen terbawah paling besar yaitu 78,25 yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan.

Apabila dilihat dari jenis kelamin penduduk, diketahui bahwa penduduk laki-laki lebih banyak yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan yaitu sebesar 89,46 persen daripada yang tidak menggunakan. Sementara di antara penduduk perempuan di Kota Bontang terdapat 79,27 persen yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Secara umum dengan tingginya persentase ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Bontang mayoritas telah memanfaatkan jaminan kesehatannya untuk berobat jalan.

4.3. Kesehatan Balita

Perbaikan kualitas sumber daya manusia merupakan proses yang panjang dan kompleks, sehingga tidak dapat dilakukan dalam sekejap dan terfokus di satu aspek. Berkaitan dengan ini, hendaknya perbaikan sumber daya manusia dimulai sejak dari dalam kandungan. Mulai dari kecukupan gizi dalam kandungan, ilmu pengetahuan ibu beserta pasangannya akan kehamilan juga kelahiran, sampai pada tersedianya tenaga medis dan fasilitas dalam membantu proses kelahiran. Proses kelahiran bayi merupakan proses yang penting dalam pembentukan sumber daya manusia. Adanya kesalahan dalam proses kelahiran akan mengakibatkan terganggunya kesehatan bayi hingga kematian bayi beserta ibunya. Seorang ibu yang melahirkan dapat ditolong oleh lebih dari satu jenis penolong medis (dokter dan bidan) maupun non-medis (dukun beranak/famili). Tabel berikut menunjukkan persentase penolong proses kelahiran menurut jenis pertolongan dalam empat tahun terakhir.

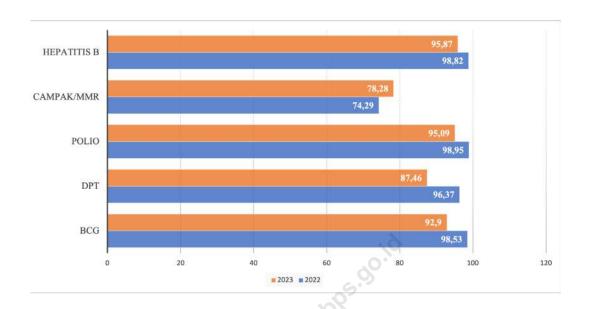
Tabel 4.4 Persentase Penolong Pertama Persalinan Menurut Penolong Kelahiran di Kota Bontang, 2020-2023

Penolong Kelahiran	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dokter	55,64	55,81	55.14	65,37
Bidan/tenaga medis lain	44,36	42,69	44.79	33,29
Dukun	-	-	0.07	1,34
Famili/lainnya	-	1,50	90:19	-
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Pada tahun 2023 diestimasi proporsi penduduk yang memilih untuk melahirkan dengan dibantu oleh tenaga kesehatan adalah sebesar 98,66 persen. Angka ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Adapun dalam empat tahun terakhir dokter memiliki persentase terbesar sebagai penolong persalinan, kemudian diikuti oleh bidan/tenaga medis lain pada urutan kedua.

Selain faktor penolong pertama persalinan dan juga tempat melahirkan, adanya imunisasi untuk balita merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap penyakit. Kementrian Kesehatan menganjurkan agar semua anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang di sekitarnya. Jenis imunisasi dasar yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B. Berikut merupakan persentase balita di Kota Bontang yang sudah diimunisasi berdasarkan jenis imunisasi.

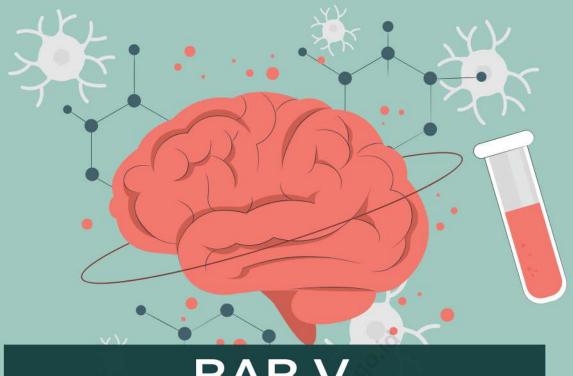


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 4.6 Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Bontang, 2022-2023

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 diestimasi 95,87 persen balita telah mendapatkan imunisasi Hepatitis B dan 95,09 persen mendapatkan imunisasi Polio. Adapun untuk imunisasi DPT sebesar 87,46 persen, campak sebesar 78,28 persen, dan BCG sebesar 92,90 persen. Hasil estimasi untuk semua jenis imunisasi selain campak/MMR cenderung mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

https://pontainglyota.bps.go.id



BAB V PENDIDIKAN





Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Bontang Tahun 2023



https://pontainglyota.bps.go.id

BAB V. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembentukan modal manusia (human capital). Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi jangka panjang. Akumulasi modal manusia selama mengikuti masa pendidikan akan berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan adanya korelasi positif yang cukup kuat antara tingkat pendidikan dan pendapatan. Sehingga dengan melakukan investasi pendidikan pada SDM yang dimiliki, dalam jangka panjang akan membantu perbaikan distribusi pendapatan ketika SDM tersebut menjadi bagian yang signifikan dalam angkatan kerja.

Pendidikan merupakan salah satu tujuan yang tercantum dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026. Salah satu tujuannya adalah dalam bidang pendidikan yaitu meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yaitu meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang professional, berkembangnya pelayanan dan aksesibilitas perpustakaan dan optimalisasi minat baca masyarakat, terjaminnya anak-anak jalanan/terlantar, anak-anak penyandang cacat dalam mengakses pendidikan maupun kesehatan, berkembangnya aktivitas kepemudaan dan olahraga, serta meningkatnya sarana prasarana penunjang pendidikan.

Peningkatan kualitas masyarakat di bidang pendidikan merupakan elemen penting untuk menunjang pembangunan suatu daerah. Adanya pendidikan yang berkualitas dan merata di antara masyarakat akan menghasilkan lebih banyak tenaga kerja yang juga berkualitas. Tenaga kerja ini diharapkan dapat bersaing di pasar tenaga kerja dan berpeluang besar untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan output atau pendapatan daerah. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan di suatu wilayah, dapat menjadi beban pemerintah. Penduduk yang

berpendidikan rendah cenderung sulit untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja. Untuk itu, pemerataan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan di suatu daerah perlu dilakukan.

Kondisi pembangunan pendidikan dapat diketahui melalui beberapa indikator pendidikan, yang terdiri dari tiga jenis yaitu indikator input, proses, dan output. Indikator input merupakan informasi atau keterangan dasar dan penunjang yang diperlukan dalam perencanaan program pendidikan. Salah satu indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator input adalah rasio murid-guru. Indikator proses merupakan keadaan proses pendidikan atau bagaimana proses pendidikan yang diimplementasikan terjadi pada masyarakat. Indikator pendidkan yang termasuk dalam indikator proses antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Pasrtisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisapasi Murni (APM). Indikator output merupakan hasil-hasil yang dicapai oleh masyarakat setelah melalui proses pendidikan. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator output antara lain angka melek huruf, angka buta huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan angka putus sekolah. Indikator-indikator pendidikan ini sangat penting untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah dilakukan dan sebagai bahan perencanaan kebijakan selanjutnya.

5.1. Melek Huruf dan Tingkat Pendidikan

Persentase penduduk 15 tahun ke atas Kota Bontang tahun 2023 yang dapat membaca dan menulis huruf latin adalah sebesar 99,16 persen. Apabila berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki untuk membaca dan menulis huruf latin lebih besar dibandingkan dengan perempuan yaitu berturut-turut sebesar 99,88 persen dan 98,41 persen. Jika dilihat dari kelompok penduduk kuintil pengeluaran, pada kelompok 20 persen teratas sebesar 100 persen dan pada kelompok pengeluaran

40 persen terbawah adalah sebesar 97,82 persen. Angka persentase penduduk yang dapat membaca dan menulis Kota Bontang dilihat dari beberapa karakteristik tersebut dapat dikatakan termasuk sangat tinggi. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pemerataan pendidikan di Kota Bontang.

Tabel 5.1 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Ijazah/STTB yang dimiliki) di Kota Bontang, 2015-2023

Tahun	SD ke Bawah	Tamat SMP	Tamat SMA	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	25,07	19,11	42,52	13,30
2016	34,42	12,67	38,64	14,27
2017	20,50	21,62	43,37	14,51
2018	25,26	15,75	43,53	15,46
2019	23,19	18,59	43,49	14,73
2020	20,01	16,80	44,20	18,99
2021	19,99	18,52	48,08	13,41
2022	20,20	18,53	44,00	17,27
2023	20,95	18,31	40,18	20,56

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

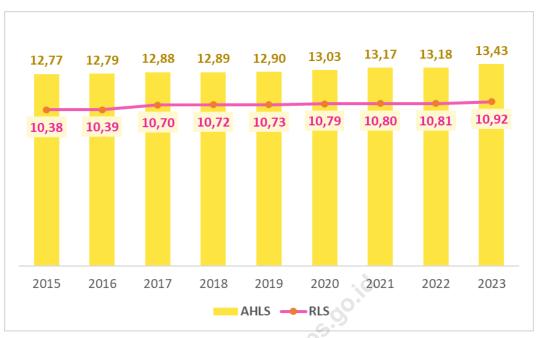
Pada tahun 2023 persentase penduduk yang tingkat pendidikan SD kebawah menunjukkan angka sebesar 20,95 persen. Sedangkan penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan SMP dan SMA berturut-turut sebesar 18,31 persen dan 40,18 persen. Adapun penduduk yang telah mengenyam pendidikan Perguruan Tinggi sebesar 20,56 persen. Jika dilihat tren antar tahun, angkanya terdapat kenaikan dan juga penurunan.

Perbedaan persentase antar tahun ini disebabkan oleh pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret antar tahun melibatkan sampel responden yang berbeda, yang menyebabkan perbedaan estimasi angka agregat. Meskipun demikian, secara umum angkanya berada dalam porsi yang proporsional dan dalam rentang toleransi statistik, sehingga tetap representatif atau mewakili untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Apabila diklasifikasikan menurut status pendidikan di Kota Bontang, penduduk 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah sebesar 4,98 persen. Sedangkan sebesar 25,20 persen penduduk masih mengenyam bangku pendidikan, sisanya sebesar 69,81 sudah tidak bersekolah lagi.

Salah satu indikator selain melek huruf adalah Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). AHLS dapat didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. AHLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Disamping Harapan Lama Sekolah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS merupakan jumlah rata-rata tahun yang ditempuh dalam bersekolah. Indikator ini menunjukkan sejauh mana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk. Kebijakan Pemerintah Kota Bontang sendiri juga menetapkan program wajar selama 12 tahun sejak 2004. Berikut ditampilkan grafik AHLS dan RLS Kota Bontang dalam kurun waktu 8 tahun terakhir pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bontang, 2015-2023

Dari grafik di atas dapat disandingkan antara Angka Harapan Lama Sekolah dengan Rata-rata Lama Sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah penduduk di Kota Bontang sejak tahun 2015 hingga 2023 mengalami kenaikan. Dari 12,77 tahun pada tahun 2015 hingga menjadi 13,43, yang artinya pada tahun 2023 penduduk usia sekolah diharapkan akan mengenyam pendidikan selama 13-14 tahun. Atau jika dikonversi dalam jenjang pendidikan maka diharapkan penduduk Kota Bontang dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA dan perguruan tinggi pada tahun pertama. Sedangkan jika dilihat dari Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kota Bontang, masih dibawah Angka Harapan Lama Sekolah.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bontang dari tahun 2015 adalah sebesar 10,38 tahun hingga sebesar 10,92 pada tahun 2023 atau masih setara pada jenjang SMA. Apabila dikonversikan pada jenjang pendidikan, penduduk Kota Bontang mengenyam minimal pada tingkat SMA kelas 2. Idealnya rata-rata lama sekolah dapat sebanding dengan angka harapan lama sekolah, sehingga tidak terlampau jauh antara kondisi ideal

yang diharapkan dengan kondisi riil pendidikan masyarakat. Rata-rata lama sekolah ini masih perlu ditingkatkan pada taraf yang lebih ideal seperti rata-rata 12 tahun untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun mengingat angka harapan lama sekolah sudah mencapai 13,43 tahun yang artinya diharapkan rata-rata lama sekolah penduduk kota bontang kedepannya mendekati angka harapan lama sekolahnya.

5.2. Tingkat Partisipasi Sekolah

Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator proses antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Pasrtisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisapasi Murni (APM). Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah indikator yang digunakan untuk melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS maka semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengakses pendidikan. Namun, perlu diperhatikan bahwa meningkatnya APS tidak serta merta menunjukkan peningkatan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Pada tahun 2023 nilai APS pada kelompok umur SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun) dan SMA (16-18 tahun) lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022. Hasil estimasi APS tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 0,93 persen penduduk umur SD, 2,44 persen penduduk umur SMP dan 16,61 persen penduduk umur SMA di Kota Bontang yang tidak bersekolah. Selain itu dalam taraf perguruan tinggi, terdapat 21,35 persen penduduk usia 19-23 tahun yang menempuh pendidikan dan sisanya sebesar 78,65 persen tidak sedang menempuh pendidikan. Nilai APS Kota Bontang yang belum mencapai 100 persen menunjukkan masih terdapat penduduk usia sekolah yang belum memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada.

Tabel 5.1 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bontang, 2022-2023

Jenjang Pendidikan	2022	2023
(1)	(2)	(3)
SD/MI	98,79	98,72
SMP/MTs	76,01	83,62
SMA/SMK/MA	64,88	78,83
PERGURUAN TINGGI	-	13,76

Tabel 5.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Kota Bontang, 2022-2023

	XV.	
Kelompok Umur	2022	2023
(1)	(2)	(3)
7-12 tahun	98,79	99,07
13-15 tahun	97,48	97,56
16-18 tahun	83,14	83,39
19-23 tahun¹	-	21,35

Catatan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Naional (Susenas) Maret

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Serupa dengan APS, APM Kota Bontang pada jenjang SMP dan SMA mengalami kenaikan dari tahun

^{:&}lt;sup>1</sup> Kelompok usia sekolah pada indikator pendidikan adalah 7-23 tahun[,] sesuai dengan Metadata SDGs

sebelumnya. Sementara pada jenjang SD nilai APM mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada jenjang pendidikan SD, APM Kota Bontang sebesar 98,72. Angka ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 98,79 persen. Angka ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 98,72 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tepat menduduki jenjang SD. Pada jenjang SMP nilai APM sebesar 83,62. Artinya, terdapat sekitar 83,62 persen penduduk usia 13-15 yang tepat menduduki jenjang pendidikan SMP. Sementara untuk jenjang SMA terdapat sekitar 78,83 persen penduduk usia 16-18 tahun yang tepat menduduki jenjang pendidikan SMA. Pada jenjang perguruan tinggi terdapat sekitar 13,76 persen penduduk usia 19-23 tahun yang tepat menduduki jenjang pendidikan perguruan tinggi. Nilai APM Kota Bontang yang belum mencapai 100 persen menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan namun tidak sesuai pada jenjang pendidikannya. Sementara itu, nilai APK tahun 2023 tidak dilakukan perhitungan.

5.3. Fasilitas Pendidikan

Keberhasilan suatu pendidikan tidak terlepas dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Beberapa indikator yang dapat dilihat adalah Rasio Murid dan Guru per jenjang pendidikan dan jumlah sekolah yang tersedia. Pada tahun ajaran 2022/2023, rasio murid guru pada jenjang SD/MI adalah 17,79 artinya setiap guru dapat mengajar 17-18 murid. Begitu pula pada jenjang SMP/MTs yaitu sebesar 16,57 di mana satu guru mengampu sebanyak 16-17 murid. Pada jenjang SMA/SMK/MA sebesar 13,24 artinya setiap guru mengampu 13-14 murid. Semakin banyak rasio maka semakin tidak efektif pada kegiatan belajar mengajar. Sebaliknya semakin sedikit rasio antara murid dan guru maka diharapkan semakin efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Penghitungan rasio murid guru ini adalah dengan membandingkan jumlah murid terhadap jumlah guru secara umum tanpa memperhatikan adanya spesialisasi jurusan dan lain sebagainya. Angka rasio yang masih besar dapat dipengaruhi faktor jumlah murid pada suatu

jenjang pendidikan. Misalnya dalam hal ini jenjang SD/MI yang memiliki rasio paling besar mengingat jumlah muridnya juga besar. Dengan demikian perlu dilakukan optimalisasi jumlah guru supaya lebih seimbang antara jumlah murid dan jumlah guru yang mengampu, sehingga tidak terjadi kekurangan akses dalam memberikan pelajaran terhadap semua murid.

Tabel 5.3 Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bontang, 2021/2022-2022/2023

Jenjang Pendidikan	2021/2022	2022/2023
(1)	(2)	(3)
SD/MI	18,14	17,79
SMP/MTs	15,54	16,57
SMA/SMK/MA	14,46	13,24

Sumber:

Jumlah sekolah di Kota Bontang dari tahun ke tahun mengalami penambahan. Pada tahun ajaran 2022/2023 jumlah sekolah setingkat SD mengalami penambahan menjadi 63 sekolah. Pada setingkat SMP, jumlah sekolah konstan sebanyak 33 sekolah sejak tahun ajaran 2020/2021. Adapun pada tingkat SMA sederajat jumlah sekolah berkurang menjadi 26. Semakin banyak sekolah yang dibangun di Kota Bontang, maka akses terhadap fasilitas pendidikan juga akan meningkat.

¹⁾ Kementrian Agama, EMIS, Data Semester Ganjil

²⁾ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Data Pokok Pendidikan, data semester ganjil

Tabel 5.4 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bontang, 2019/2020 - 2022/2023

Tahun	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA
(1)	(2)	(3)	(4)
2019/2020	61	34	27
2020/2021	61	33	27
2021/2022	61	33	27
2022/2023	63	33	26

Sumber:

¹⁾ Kementrian Agama, EMIS, Data Semester Ganjil

²⁾ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Data Pokok Pendidikan, data semester ganjil





Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut lapangan usaha utama di Kota Bontang Tahun 2023



https://pontainglyota.bps.go.id

BAB VI. KETENAGAKERJAAN

Dalam proses pembangunan, penduduk yang berada pada dua posisi yaitu sebagai pelaku pembangunan sekaligus sebagai sasaran pembangunan itu sendiri. Sebagai pelaku dalam pembangunan, jumlah penduduk yang besar dapat memberikan nilai positif bagi pembangunan. Semakin banyak Sumber Daya Manusia (SDM) maka diperlukan pembekalan keterampilan yang berkualitas, sehingga dapat diberdayakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Jumlah penduduk yang banyak, namun tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang baik maka dapat berdampak negatif terhadap pembangunan.

Berbicara tentang penduduk, penduduk di usia produktif menjadi sorotan utama untuk menunjang sektor pembangunan. Kelompok usia ini (15-64 tahun) dapat menjadi aset bagi bangsa sebagai agen pembangunan, namun juga dapat menjadi beban di saat yang bersamaan. Bila penduduk usia produktif memiliki kualitas yang tinggi baik dari segi pendidikan maupun keterampilan, maka dapat menjadi pendorong kuat majunya pembangunan di suatu wilayah. Sebaliknya, jika memiliki pendidikan dan keterampilan yang rendah akan menjadi beban pada proses pembangunan.

Penduduk usia produktif erat kaitannya dengan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan dalam Rangka Kerja Pemerintah adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar tenaga kerja tiap tahunnya.

Pertumbuhan penduduk yang relatif lebih tinggi perlu diimbangi dengan kesempatan atau lapangan pekerjaan yang tersedia. Laju pertumbuhan yang tinggi namun tidak diimbangi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan akan menimbulkan masalah tersendiri yaitu pengangguran. Masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang adalah terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal, sehingga sebagian besar penduduk berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan di sektor informal.

Pekerja di sektor informal memiliki ciri seperti pekerja dnegan pendidikan yang rendah, jam kerja yang tidak tetap, produktivitas rendah, dan pendapatan rendah. Melihat kondisi ketenagakerjaan demikian, maka perlu adanya upaya program yang memfasilitasi masyarakat untuk membuka lapangan kerja baru. Tenaga kerja yang lebih mandiri dan memiliki kualitas yang baik akan meningkatkan produktivitas kerja dan secara langsung dapat meningkatkan taraf hidup penduduk.

6.1. Keadaan Angkatan Kerja

Kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Indikator TPAK merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi (bekerja dan atau mencari pekerjaan) dengan seluruh penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan jumlah penduduk yang potensial untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Makin besar nilai TPAK menunjukkan makin besar jumlah penduduk yang terlibat dan berusaha terlibat di dalam kegiatan produksi barang dan jasa pada suatu waktu tertentu.

Indikator TPT merupakan persentase penduduk usia kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan terhadap jumlah keseluruhan angkatan kerja. Sedangkan TKK adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Berikut tabel yang menggambarkan ketenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2022 dan 2023.

Tabel 6.1 Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Menurut Kegiatan Utama dan Indikator Ketenagakerjaan di Kota Bontang, 2022-2023

Rincian	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Angkatan Kerja	99.150	94.923
A. Bekerja	91.408	87.575
B. Pengangguran	7.742	7.348
Bukan Angkatan Kerja	38.409	43.955
Jumlah Usia Kerja	137.559	138.878
ТРАК	72,08	68,35
ТРТ	7,81	7,74
ткк	92,19	92,26

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

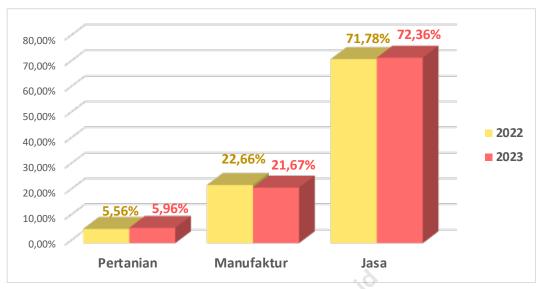
Jumlah angkatan kerja di Kota Bontang pada tahun 2023 adalah sekitar 94.923 atau sebesar 68,35 persen dari jumlah penduduk usia kerja. Sedangkan, sebanyak 43.955 jiwa atau sekitar 31,65 persen tergolong sebagai bukan angkatan kerja yang terdiri dari penduduk yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau mengerjakan kegiatan lainnya.

Berdasarkan Tabel 6.1 dapat dilihat jumlah angkatan kerja dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan, dengan kondisi jumlah penduduk yang bekerja meningkat dan pengangguran juga menurun. Terjadinya penurunan pengangguran sebesar 0,07 persen ini dapat disebabkan oleh adanya pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 yang sangat memengaruhi aspek ketenagakerjaan seperti lapangan usaha dan sebagainya.

Indikator untuk melihat angka pengangguran adalah TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yaitu proporsi penduduk yang menganggur dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2022 angka TPT di Kota Bontang adalah sebesar 7,81 persen dan pada tahun 2023 sebesar 7,74 persen persen. Angka ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Penurunan TPT tidak terlepas dari indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Tercatat TKK di Kota Bontang adalah sebesar 92,26 persen pada tahun 2023. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 92,19 persen yang artinya terdapat peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja.

6.2. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Kota Bontang merupakan kota industri yang sekarang akan berubah haluan menjadi kota pariwisata dan maritim. Pada tahun 2023, dengan menggunakan klasifikasi lapangan usaha tiga sektor, dihasilkan angka sekitar 72,36 persen penduduk Kota Bontang bekerja di sektor jasa. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 71,78 persen. Pola yang sama juga terjadi untuk sektor pertanian, dimana terjadi peningkatan sekitar 0,40 persen. Sebaliknya, persentase penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan atau manufaktur mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 persentase penduduk yang bekerja di sektor manufaktur yaitu 22,66 persen dan kemudian menurun pada pada tahun 2023 menjadi 21,67.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

Gambar 6.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kota Bontang, 2022-2023

Apabil dilihat berdasarkan status pekerjaan di pekerjaan utama, penduduk Kota Bontang Tahun 2023 didominasi oleh Buruh/Karyawan/Pegawai yaitu sebesar 63,57 persen. Hal ini tergambarkan dengan jelas di lapangan bahwa banyak perusahan Industri dan juga perkantoran yang ada di Kota Bontang seperti PT. Pupuk Kaltim, PT. Badak LNG, PT. Pama Persada, dan lain sebagainya. Sehingga sebagian besar penduduknya adalah berstatus sebagai karyawan.



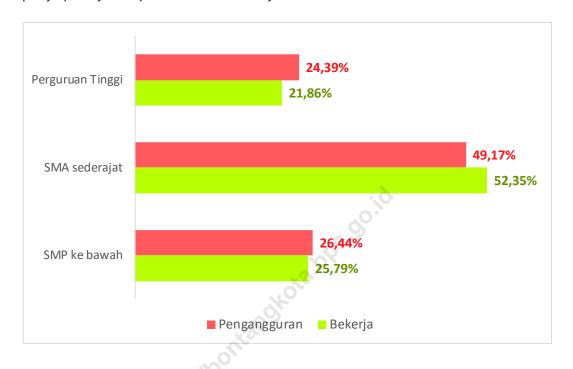
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

Gambar 6.2 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Pekerjaan Utama Kota Bontang, 2023

Meskipun didominasi oleh tenaga kerja yang berstatus sebagai buruh/ karyawan/pegawai, namun minat berwirausaha di Kota Bontang masih cukup tinggi. Hal ini terlihat pada jumlah tenaga kerja yang memilih untuk berusaha sendiri yang sebesar 17,52 persen dari seluruh tenaga kerja yang ada, dan juga berusaha dibantu buruh tidak tetap atau pekerja keluarga atau yang identik dengan usaha keluarga sebesar 6,06 persen.

Apabila dibandingkan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, mayoritas penduduk yang bekerja adalah penduduk dengan ijazah terakhir setingkat SMA sederajat yaitu sebesar 52,35 persen. Namun, penduduk yang tidak bekerja atau menganggur juga didominasi oleh penduduk lulusan setingkat SMA, yaitu dengan proporsi 49,17 persen. Sementara, proporsi pengangguran tertinggi kedua adalah penduduk dengan ijazah terakhir setingkat SMP ke bawah. Perlu digarisbawahi bahwa

pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari kerja, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

Gambar 6.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Berdasarkan Jenis Kegiatan dan Tingkat Pendidikan di Kota Bontang, 2023

https://pontainglyota.bps.go.id





Persentase Status Kepemilikan Rumah di Kota Bontang



https://pontainglyota.bps.go.id

BAB VII. PERUMAHAN

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia selain pangan dan sandang. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, dan aset bagi pemiliknya. Sedangkan perumahan didefinisikan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kualitas perumahan akan dipengaruhi oleh kualitas rumah penduduk beserta kawasan permukiman.

Penilaian kualitas rumah sering dikaitkan dengan kondisi perumahan yang sehat. Kondisi perumahan yang dimiliki secara tidak langsung dapat mencerminkan kualitas penghuni yang tinggal didalamnya, salah satunya adalah kualitas kesehatan. Terdapat beberapa indikator untuk penilaian rumah sehat, antara lain luas lantai yang ditempati, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan kepemilikan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti listrik, air minum, dan tempat pembuangan air besar.

7.1. Kondisi Perumahan

Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator awal yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki rumah sendiri relatif lebih mapan dibandingkan dengan rumah tangga yang menguasai rumah kontrakan. Berdasarkan status penguasaannya maka rumah dibedakan menjadi rumah milik sendiri, rumah sewa/kontrak, dan rumah lainnya, seperti rumah bebas sewa atau rumah dinas. Tabel 7.1 di bawah ini menunjukkan persentase rumah tangga berdasarkan status kepemilikan rumah di Kota Bontang.

Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kota Bontang, 2020-2023

Status Kepemilikan Rumah	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Milik sendiri	59,65	62,09	59,74	74,30
Kontrak/sewa	28,08	28,29	31,19	15,71
Lainnya	12,27	9,62	9,07	9,98
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Penduduk di Kota Bontang yang menguasai rumah dengan status kepemilikan milik sendiri adalah sebesar 74,30 persen pada tahun 2023. Penduduk dengan status penguasaan rumah milik sendiri memiliki persentase yang paling besar dibandingkan dengan status penguasaan kontrak/sewa dan lainnya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, status kepemilikan rumah milik sendiri di Kota Bontang mengalami peningkatan sekitar 14,56 persen. Sedangkan, untuk status rumah kontrak/sewa terjadi penurunan sebesar 15,48 persen. Rumah tangga dengan status kepemilikan rumah lainnya (bebas sewa atau rumah dinas) mengalami peningkatan menjadi 9,98 persen. Pada tahun 2023 terdapat sekitar 15,71 persen rumah tangga yang menggunakan rumah kontrak/sewa. Pada tabel dapat dilihat bahwa sejak tahun 2020 persentase kepemilikan rumah kontrak/sewa terus meningkat dan kemudian menurun pada tahun 2023.

Indikator-indikator selanjutnya yang dapat digunakan dalam menilai kelayakan rumah yang ditempati oleh rumah tangga adalah luas lantai, jenis atap, dan jenis dinding yang digunakan. Jenis atap, dinding, dan lantai sebuah rumah mempengaruhi kenyamanan penghuninya, bahkan lebih jauh dapat mempengaruhi tingkat kesehatan.

Tabel 7.2 berikut ini menyajikan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi rumah yang ditempati oleh rumah tangga Kota Bontang secara rata-rata.

Tabel 7.2 Kondisi Perumahan di Kota Bontang, 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rata-rata luas lantai yang dikuasai rumah tangga (m²)	95,36	83,27	100,03	101,12
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah beratap seng, asbes, dan genteng	96,51	98,11	96,91	97,23
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berdinding tembok	80,32	77,34	78,30	78,30
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berdinding kayu	19,53	22,66	21,59	21,23
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berlantai bukan tanah	99,88	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Tingkat kepadatan penduduk Kota Bontang termasuk didalam tingkat kepadatan penduduk yang masih relatif rendah dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Kalimantan Timur. Sehingga ketersediaan lahan untuk pemukiman masih cukup tinggi. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh angka rata-rata luas lantai tempat tinggal yang mencapai 101,12 m² pada tahun 2023. Apabila secara rata-rata dianggap setiap rumah tangga terdiri atas empat orang, maka rata-rata setiap anggota keluarga menempati luas lantai sekitar 25 m² atau dapat dikatakan layak huni.

Selain ditinjau dari luas lantai,kesejahteraan juga dapat dilihat dari kondisi rumah yaitu berupa atap. Berdasarkan jenisnya, terdapat beberapa macam bahan yang biasa digunakan sebagai atap yaitu genteng, sirap, seng, asbes, dan ijuk/rumbia. Sekitar 97,23 persen rumah tangga pada tahun 2023 menggunakan atap berjenis seng, asbes, dan genteng. Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan jenis dinding terluas yang digunakan, Tabel 7.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 sekitar 78,30 persen

rumah tangga di Kota Bontang menempati rumah berdinding tembok. Proporsi rumah tangga yang menempati rumah berdinding kayu berjumlah sekitar 21,23 persen. Selain berkaitan dengan kenyamanan, jenis dinding terluas yang digunakan juga berkaitan dengan keamanan penghuninya, terutama terhadap kemungkinan terjadinya musibah kebakaran. Namun demikian, dinding kayu tidak selalu bisa diasosiasikan dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, karena jenis kayu yang digunakan sangat beragam secara kualitas dan harga. Kelangkaan pasokan kayu mengakibatkan rumah berdinding jenis kayu tertentu justru mengindikasikan tingkat kesejahteraan pemiliknya yang tinggi.

Membicarakan tentang kelayakan hunian juga tidak terlepas dari kondisi lantai. Rumah dikatakan layak huni apabila berlantai selain tanah, seperti marmer, tegel, semen, atau kayu. Pada tahun 2023 di Kota Bontang persentase rumah tangga yang menempati rumah berlantai bukan tanah sudah sangat tinggi, yaitu mencapai angka 100,00 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kota Bontang menghuni rumah dengan lantai bukan tanah.

7.2. Fasilitas Rumah

Selain diindikasikan dengan bentuk dan kondisi bangunan fisik, rumah layak huni juga dipengaruhi oleh ketersediaan berbagai fasilitas pendukung lainnya seperti sumber penerangan dan fasilitas pembuangan akhir yang memadai. Tabel di bawah ini memberikan gambaran rumah tangga Kota Bontang berdasarkan ketersediaan fasilitas rumah yang ditempati.

Tabel 7.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan/Bangunan di Kota Bontang, 2020-2023

Fasilitas Perumahan / Bangunan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah tangga pengguna listrik sebagai sumber utama penerangan	100,00	99,96	99,53	99,77
Rumah tangga yang menggunakan tangki septik	91,41	93,95	85,75	87,66

Ketersediaan sumber penerangan yang memadai merupakan faktor pendukung kelancaran aktivitas penduduk. Pada Tabel 7,3 dapat dilihat bahwa mayoritas rumah tangga di Kota Bontang telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Pada tahun 2023, sekitar 99,77 persen rumah tangga menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Banyaknya jumlah rumah tangga yang telah teraliri listrik tentu saja harus diikuti oleh pasokan listrik yang mencukupi. Listrik di Kota Bontang sebagian besar dipasok oleh PLN dan sebagian dibangkitkan oleh perusahaan yang beroperasi di Kota Bontang seperti PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak LNG, dan sebagian kecil dibangkitkan sendiri oleh rumah tangga menggunakan genset dan listrik tenaga matahari. Listrik yang dibangkitkan oleh perusahaan utamanya ditujukan untuk perumahan karyawannya.

Pada tahun 2023, rumah tangga yang dialiri oleh listrik PLN adalah sekitar 97,52 persen. Sedangkan yang dialiri lisrik non PLN adalah sekitar 2,24 persen. Persentase rumah tangga berdasarkan sumber penerangan utama yang digunakan ditunjukkan oleh Tabel 7.4. Selain itu, pada Tabel 7.3 dapat dilihat bahwa terdapat sekitar 87,66 persen rumah tangga yang menggunakan tangki septik di rumahnya. Adapun angka ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 85,75 persen.

Tabel 7.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kota Bontang, 2022-2023

Sumber Penerangan	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Listrik PLN	96,80	97,52
Listrik Non PLN	2,73	2,24
Bukan Listrik	0,47	NA
Total	100,00	100,00

Sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga di Kota Bontang cukup beragam, misalnya air minum dalam kemasan bermerk, air isi ulang, ledeng, maupun sumur. Tabel 7.5 menunjukkan persentase rumah tangga berdasarkan sumber air minum utama yang dikonsumsi.

Sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga dengan persentase terbesar adalah air isi ulang yaitu sebesar 88,65 persen dan air air ledeng sebesar 9,33 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, persentase penggunaan air isi ulang mengalami peningkatan yang paling besar yaitu sekitar 2,06 persen. Sedangkan, untuk sumber air minum lainnya cenderung mengalami penurunan.

Tabel 7.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang Digunakan di Kota Bontang, 2022-2023

Sumber Air Minum	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	
Air kemasan bermerk	2,11	1,81	
Air isi ulang	86,59	88,65	
Air leding	10,63	9,33	
Sumur bor/pompa	0,10	NA	
Sumur terlindung	0,57	NA	
Sumur tak terlindung	plos	-	
Mata air terlindung	Though -	-	
Mata air tak terlindung	atans -	-	
Lainnya	1100,	NA	
Total	100,00	100,00	

Tabel 7.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Bontang, 2020-2023

Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sendiri	97,27	98,16	96,29	96,19
Bersama/umum	2,20	1,84	2,17	2,85
Tidak ada	0,53	-	1,54	NA
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Apabila dilihat berdasarkan penggunaan fasilitas tempat buang air besar, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 7.6, pada tahun 2023 sebagian besar rumah tangga telah menggunakan tempat buang air besar sendiri yaitu sekitar 96,19 persen dari seluruh rumah tangga yang ada. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar secara umum/bersama-sama dengan rumah tangga lain adalah sekitar 2,85 persen.

Jenis kloset yang digunakan pada fasilitas tempat buang air besar juga sangat berpengaruh pada kesehatan para pemakainya. Jenis kloset yang cenderung tertutup seperti leher angsa adalah sangat baik apabila dilihat dari segi kesehatan maupun segi estetika. Sedangkan jenis kloset seperti cemplung/cubluk maupun plengsengan dapat menimbulkan masalah seperti bau yang mengganggu. Tabel 7.7 berikut ini menunjukkan persentase rumah tangga di Kota Bontang berdasarkan jenis kloset yang digunakan.

Tabel 7.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang Digunakan di Kota Bontang, 2020-2023

Jenis Kloset	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Leher angsa	97,38	97,83	93,73	92,89
Plengsengan	-	-	0,33	1,73
Cemplung/cubluk	2,62	2,17	5,94	5,37
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Jenis kloset yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga di Kota Bontang adalah yang berbentuk leher angsa, yaitu kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf U (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar. Rumah tangga yang menggunakan kloset jenis ini adalah sekitar 92,89 persen. Selain itu ditemukan juga sebagian kecil rumah tangga yaitu sekitar 1,73 persen yang menggunakan kloset berjenis plengsengan. Kloset plengsengan adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran. Sementara, rumah tangga yang menggunakan kloset berjenis cemplung/cubluk adalah sekitar 5,37 persen yang biasanya digunakan oleh rumah tangga yang tinggal berada di wilayah sungai dan laut.

https://pontainglyota.bps.go.id











https://pontainglyota.bps.go.id

BAB VIII. POLA KONSUMSI

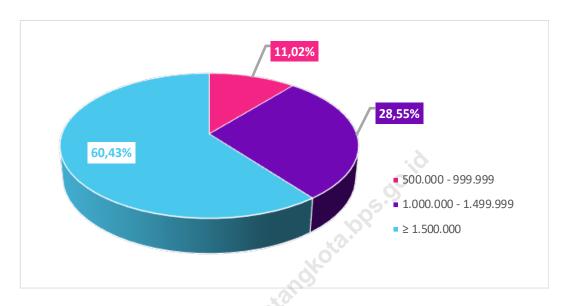
Berbicara tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata, dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan tingkat kesejahteraan dilakukan dengan melihat pola pengeluaran rumah tangga berdasarkan pengeluaran. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan untuk bukan makanan. Pola di negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Perubahan angka persentase tersebut setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf kehidupan rumah tangga.

Melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS Kota Bontang pada Maret 2023, diperoleh informasi mengenai keadaan sosial ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bontang. Berikut disajikan beberapa indikator yang diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bontang pada tahun 2023.

8.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Tingkat kesesjahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dibandingkan dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Mengingat data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, maka dilakukan pendekatan melalui pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi pengeluaran maka dapat menjadi indikasi semakin sejahtera suatu rumah tangga. Berdasarkan Gambar 8.1, dapat dilihat bahwa di Kota Bontang sebesar 60,43 persen penduduk memiliki pengeluaran per kapita sebulan minimal Rp1.500.000.

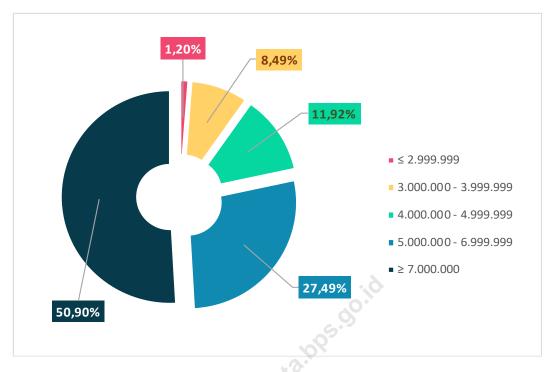
Lebih dari seperempat proporsi penduduk memiliki pengeluaran perkapita sebulan antara Rp1.000.000 hingga Rp1.499.999. Selain itu, masih terdapat sebagian penduduk dengan pengeluaran per kapita sebulan di bawah Rp1.000.000 yaitu sebanyak 11,02 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 8.1 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Bontang, 2023

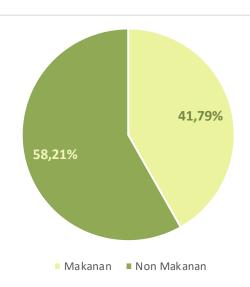
Jika dilihat dari sisi rumah tangga, sebagian besar atau sekitar 50,90 persen rumah tangga di Kota Bontang memiliki pengeluaran ≥ Rp7.000.000 per bulannya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8.2. Selain itu, dapat dilihat bahwa masih ada sebagian kecil rumah tangga yang memiliki pengeluaran per bulan kurang dari Rp3.000.000 yaitu sebesar 1,20 persen rumah tangga. Berdasarkan nilai-nilai ini dapat dikatakan bahwa penduduk Kota Bontang berada dalam taraf kehidupan menengah ke atas. Namun, masih ditemukannya rumah tangga yang memiliki pengeluaran yang sedikit maka mengindikasikan masih ada rumah tangga yang memiliki pendapatan kecil. Pendalaman tentang kesenjangan di antara rumah tangga Kota Bontang perlu untuk lebih didalami, sehingga kondisi kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya dapat diketahui.



Gambar 8.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran Sebulan di Kota Bontang, 2023

8.2. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga

Pada daerah yang sedang berkembang, pengeluaran untuk keperluan makanan masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran rumah tangga. Sementara di daerah yang maju, pengeluaran bukan makanan merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga karena pengeluaran makanan bukan lagi dianggap sebagi kebutuhan utama. Pengeluaran primer sudah bergeser pada pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan sebagainya. Bagi daerah yang sedang berkembang stabilitas harga kebutuhan pokok perlu dijaga karena adanya kenaikan harga kebutuhan pokok baik untuk komoditas makanan maupun non makanan yang tidak diimbangi dengan adanya peningkatan pendapatan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat.



Gambar 8.3 Persentase Pengeluaran Rumah Tangga Menurut Jenisnya Kota Bontang, 2023

Apabila dibedakan berdasarkan jenis pengeluaran, rumah tangga di Kota Bontang tahun 2023 memiliki proporsi pengeluaran non makanan yang lebih besar dibandingkan dengan makanan yaitu sebesar 58,21 persen, sedangkan untuk pengeluaran makanan sebesar 41,79 persen. Adapun jika dilihat pada Tabel 8.1, pengeluaran makanan per kapita atau per penduduk dalam satu bulan, menunjukkan bahwa persentase pengeluaran makanan terbesar ialah untuk pengeluaran makanan dan minuman jadi yaitu sebesar 38,51 persen pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 38,32 persen pada tahun 2023. Pola konsumsi penduduk Kota Bontang cenderung konsumtif untuk makanan dan minuman jadi yang artinya untuk memenuhi makanan dan minuman sehari-hari masyarakat lebih memilih untuk membeli di luar, terlebih saat ini banyak bermunculan makanan kekinian dan *café*. Selain itu penduduk Kota Bontang masih menjadi penggemar jenis-jenis ikan, yang mana ditunjukkan oleh persentase pengeluaran makanan terbesar kedua untuk kelompok makanan Ikan/Udang/Cumi/Kerang sebesar 11,28 persen. Pada tahun 2023 kelompok padi-padian masih menempati persentase terbesar ketiga yaitu sebanyak 8,39 persen.

Tabel 8.1 Rata-Rata dan Persentase Pengeluaran Makanan Per Kapita Kota Bontang, 2022-2023

Kelompok Makanan	Rata-rata Pengeluaran (rupiah)		luaran Persentase Rata-rata Pengeluaran	
Reioiiipok makanan	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi-padian	70.358	72.203	8,03	8,39
Umbi-umbian	8.447	8.250	0,96	0,96
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	96.537	97.095	11,02	11,28
Daging	51.061	58.244	5,83	6,77
Telur dan susu	55.076	45.388	6,28	5,27
Sayur-sayuran	59.835	61.609	6,83	7,16
Kacang-kacangan	15.090	14.255	1,72	1,66
Buah-buahan	43.462	42.676	4,96	4,96
Minyak dan Kelapa	18.857	16.841	2,15	1,96
Bahan minuman	19.998	17.746	2,28	2,06
Bumbu-bumbuan	17.886	17.916	2,04	2,08
Konsumsi lainnya	20.023	15.098	2,28	1,75
Makanan dan minuman jadi	337.524	329.844	38,51	38,32
Rokok dan tembakau	62.206	63.557	7,10	7,38
Total	876.362	860.724	100,00	100,00

Tabel 8.2 Rata-Rata dan Persentase Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Kota Bontang, 2022-2023

Kelompok Bukan Makanan	Rata-rata Pengeluaran (rupiah)		Persentase Rata-rata Pengeluaran	
Reioiiipok bukaii makanan	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	603.215	609.292	52,59	50,82
Aneka barang dan jasa	279.661	287.242	24,38	23,96
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	47.920	51.705	4,18	4,31
Barang yang tahan lama	85.725	69.738	7,47	5,82
Pajak, pungutan, dan asuransi	109.100	107.635	9,51	8,98
Keperluan pesta dan upacara	21.348	73.422	1,86	6,12
Total	1.146.969	1.199.033	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 8.2, pada tahun 2023 persentase terbesar pengeluaran non makanan didominasi oleh konsumsi dalam bentuk perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu sebesar 50,82 persen. Selain itu, dapat dilihat bahwa sebesar 23,96 persen dihabiskan untuk aneka barang dan jasa. Untuk pembelian pakaian alas kaki dan tutup kepala masih berada dibawah barang tahan lama yang berturut-turut sebesar 4,31 persen dan 5,82 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 secara ratarata pengeluaran terhadap pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, serta keperluan pesta dan upacara mengalami peningkatan. Sedangkan pola pengeluaran untuk kategori lainnya cenderung menurun.



LAMPIRAN



https://pontainglyota.bps.go.id

Lampiran 1. Relative Standard Error (RSE) Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kota Bontang, 2023

Karakteristik	RSE Angka Kesakitan
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Laki-laki	15,62
Perempuan	14,33
Kota Bontang	12,32
Kota Bontang Catatan: ¹Jika RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hat ²Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret	ota.105.00°

Lampiran 2. Relative Standard Error (RSE) Persentase Penolong Pertama
Persalinan Menurut Penolong Kelahiran di Kota Bontang, 2023

Karakteristik	RSE
(1)	(2)
Dokter Kandungan	9,99
Dokter Umum	NA
Bidan	19,52
Perawat	NA
Tenaga Kesehatan Lainnya	NA
Dukun Beranak	94,822
Lainnya	94,82 ² NA NA
Tidak Ada	NA
Catatan: ¹Jika RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-ha ²Jika RSE >50%, estimasi dianggan tidak akurat	ti

²Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat

Lampiran 3. Relative Standard Error (RSE) Persentase Penduduk Usia 10
Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan (Ijazah/STTB yang dimiliki) di Kota Bontang, 2023

Karakteristik	RSE
(1)	(2)
Tidak Mempunyai Ijazah	15,34
SD sederajat	8,74
SMP sederajat	6,91
SMA/SMK sederajat	3,67
Perguruan Tinggi	9,16

²Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat

Lampiran 4. Relative Standard Error (RSE) Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk menurut Karakteristik di Kota Bontang, 2023

Karakteristik	RSE
(1)	(2)
АРМ	
SD	0,74
SMP	5,05
SMA	6,12
PERGURUAN TINGGI	27,78
APS	, O. 10, A.
7 – 12 tahun	0,64
13 – 15 tahun	2,46
16 – 18 tahun	5,35
19 – 23 tahun	19,69

 2 Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat

Lampiran 5. Relative Standard Error (RSE) Rata-Rata Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) di Kota Bontang, 2023

Kelompok Komoditas	RSE Rata-Rata Pengeluaran
(1)	(2)
Padi-padian	1,80
Umbi-umbian	5,93
Ikan/udang/cumi/kerang	3,75
Daging	5,28
Telur dan susu Sayur-sayuran	6,04
Sayur-sayuran	2,76
Kacang-kacangan	4,79
Buah-buahan	5,26
Minyak dan kelapa	3,04
Bahan minuman	3,07
Bumbu-bumbuan	3,25
Konsumsi lainnya	4,95
Makanan minuman jadi	2,99
Rokok dan tembakau	7,46
RSE Total Makanan	2,17

²Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat

Lampiran 6. Relative Standard Error (RSE) Rata-Rata Pengeluaran Bukan Makanan per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) di Kota Bontang, 2023

Kelompok Komoditas	RSE Rata-Rata Pengeluaran
(1)	(2)
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	3,30
Aneka barang dan jasa	5,43
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	5,66
Barang tahan lama	18,21
Pajak, pungutan dan asuransi	4,37
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	35,331
RSE Total Bukan Makanan	4,59

²Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat

Lampiran 7. Relative Standard Error (RSE) Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Menurut Kegiatan Utama dan Indikator Ketenagakerjaan di Kota Bontang, 2023

Rincian	RSE
(1)	(2)
Angkatan Kerja	4,59
A. Bekerja	4,49
B. Pengangguran	14,94
Jumlah Usia Kerja	4,18
Catatan: 'Jika RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati ² Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus	A.10195.000.100 M.0

Lampiran 8. Relative Standard Error (RSE) Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kota Bontang, 2023

Status Kepemilikan Rumah	RSE
(1)	(2)
Milik sendiri	2,95
Kontrak/sewa	11,33
Lainnya	15,18
Catatan: ¹Jika RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati ²Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret	3.ta.l.ps.do.id

Lampiran 9. Relative Standard Error (RSE) Kondisi Perumahan di Kota Bontang, 2023

Indikator	RSE
(1)	(2)
Rata-rata luas lantai yang dikuasai rumah tangga (m²)	3,42
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah beratap seng, asbes, dan genteng	0,88
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berdinding tembok	2,92
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berdinding kayu	10,70
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berlantai bukan tanah	0,00
Catatan: ¹Jika RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati ²Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret	

Lampiran 10. Relative Standard Error (RSE) Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan/Bangunan di Kota Bontang, 2023

Fasilitas Perumahan / Bangunan	RSE
(1)	(2)
Rumah tangga pengguna listrik sebagai sumber utama penerangan	0,22
Rumah tangga yang menggunakan tangki septik	2,18

²Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat

https://pontangkota.bps.go.id Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Lampiran 11. Relative Standard Error (RSE) Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kota Bontang, 2023

Sumber Penerangan	RSE
(1)	(2)
Listrik PLN	0,98
Listrik Non PLN	41,50¹
Bukan Listrik	95,65²
Catatan: ¹Jika RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati ²Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret	

²Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat

Lampiran 12. Relative Standard Error (RSE) Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang Digunakan di Kota Bontang, 2023

Sumber Air Minur	n RSE
(1)	(2)
Air kemasan bermerk	36,10¹
Air isi ulang	1,75
Air leding	15,23
Sumur bor/pompa	100,07²
Sumur terlindung	100,19²
Sumur tak terlindung	NA
Mata air terlindung	NA
Mata air tak terlindung	NA
Lainnya	100,22²

²Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat

Lampiran 13. Relative Standard Error (RSE) Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Bontang,

Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar	RSE
(1)	(2)
Sendiri	1,11
Bersama/umum	32,621
Tidak ada	57,03 ²
Catatan: 'Jika RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati ¹Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret	

Lampiran 14. Relative Standard Error (RSE) Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang Digunakan di Kota Bontang, 2023

Jenis Kloset	RSE
(1)	(2)
Leher angsa	1,78
Plengsengan	48,10¹
Cemplung/cubluk	27,35 ¹
Cemplung/cubluk Catatan: ¹Jika RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati ³Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret	

Lampiran 15. Relative Standard Error (RSE) Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Bontang, 2023

Kelompok Pengeluaran Per Kapita Sebulan	RSE
(1)	(2)
500.000 - 999.999	19,29
1.000.000 - 1.499.999	9,59
≥ 1.500.000	4,88
Catatan: ¹Jika RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati ²Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret	

Lampiran 16. Relative Standard Error (RSE) Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran Sebulan di Kota Bontang, 2023

Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan	RSE	
(1)	(2)	
≤ 2.999.999	37,08 ¹	
3.000.000 - 3.999.999	15,39	
4.000.000 - 4.999.999	14,07	
5.000.000 - 6.999.999	8,52	
≥ 7.000.000	5,14	
Catatan: ¹Jika RSE >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati ²Jika RSE >50%, estimasi dianggap tidak akurat Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret		

https://pontainglyota.bps.go.id







Jl. Awang Long No. 02 RT 08 Kota Bontang Telp. (0548)26066 fax. (0548)27706

Email: bps6474@bps.go.id Homepage: http://bontangkota.bps.go.id

